KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021. Renstra disusun melalui berbagai tahapan termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Renstra ini merupakan dasar dan pedoman bagi eselon II, III, IV dan UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat serta acuan bagi SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Padang, September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Sumbar,

Drs. Burhasman, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19590424 198403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistimatis untuk mengembangkan potensi masyarakat. Pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis untuk mewujudkan masyarakat madani (berperadapan tinggi) dan sejahtera. Kaitan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasion aladalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang berkualitas dan bertanggungjawab, serta sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi sekaligus hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat Warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih jauh menyebutkan, gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada pembaharuan kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan terhadap perlunya pembaharuan pendidikan, telah mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas sebagai salah satu agenda pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas beranjak dari suatu pemikiran bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara keberhasilan pembangunan Sumatera Barat dengan pembangunan sektor pendidikan. Di sisi lain pesatnya perkembangan global, teknologi dan informasi yang menuntut keseriusan terhadap pembangunan SDM Sumatera Barat. Dengan terbatasnya sumber daya alam maka pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Agar terlaksananya agenda pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas ini, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Pendidikan tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Disamping itu, Renstra yang disusun juga mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019, serta Renstra Kab/Kota yang ada kaitannya dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Renstra ini merupakan pedoman Renja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera barat dan bagi semua stakeholders pendidikan di Sumatera Barat dengan tetap memperhatikan rambu-rambu kewenangan sebagaimana diatur pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Sumatera Barat merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, sesuai kondisi dan potensi serta dinamika pembangunan yang dimiliki Sumatera Barat.

Berdasarkan peraturan per Undang-Undangan di atas maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD, wajib menyusun Rencana Strategis Pendidikan Sumatera Barat. Keterkaitannya secara detail dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota akan dijabarkan pada Bab berikutnya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan proses sebagai berikut :

1) Penyusunan Rancangan Awal Renstra
2) Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari visi, misi dan program SKPD ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.
3) Pelaksanaan Rapat koordinasi dan singkronisasi Renstra yang diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan materi rancangan awal Rencana strategis.
4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1) Landasan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945

3) Landasan Operasional adalah :

a) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
i) Undang-Undang N0 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
j) Peraturan Pemerintah No. 58 /2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Th.2005 , tambahan LN No.4578)
k) Peraturan Pemerintah No 6 /2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyeleng- garaan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 No.19 TLN No.4815)
l) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (LN tahun 2008 No. 21, TLN No. 4817)
m) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi dan PP No.66 tahun 2010 tentang perubahan penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
n) Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
o) Permendagri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
p) Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
q) Perda No. 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat tahun 2005 s.d 2025

r) Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

s) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 86 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Inklusif

t) Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2016 tanggal 050/389/VIII/Eko/Bappeda/2016 perihal Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir RENCANA STRATEGIS SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

u) Surat Sekretaris Daerah nomor 908/434/KPTS/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Hasil Pembahasan/Verifikasi Renstra SKPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah:

a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunaan pendidikan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021 dapat tercapai.

b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunanan pendidikan tahunan.

d) Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pendidikan.

2) Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah:

a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
e. Memudahkan para pemangku kepentingan dalam merencanakan kegiatan
f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima
g. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan (Stakeholders)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

- 2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya yang Dimiliki
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Kab/Kota
- 3.4 Penetapan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS dan KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA & PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja Makro
- 5.3. Pendanaan Indikatif

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, salah satu institusi pemerintah yang menangani sektor pendidikan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai tanggung jawab melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan serta peningkatan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berpedoman kepada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Undang–Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis, agama dan budaya yang dianutnya. Layanan pendidikan diharapkan dapat melahirkan warga negara Indonesia yang cerdas dan memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan moderen yang menjiwai nilai-nilai Pancasila.

UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat digambarkan struktur organisasi beserta jumlah personilnya, tugas dan fungsi, serta tata laksana (proses, prosedur, mekanisme) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PERDA Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2014 dan PERGUB Sumatera Barat No. 58 Tahun 2014 Tentang PEmbentukan UPTD, adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi
SKPD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

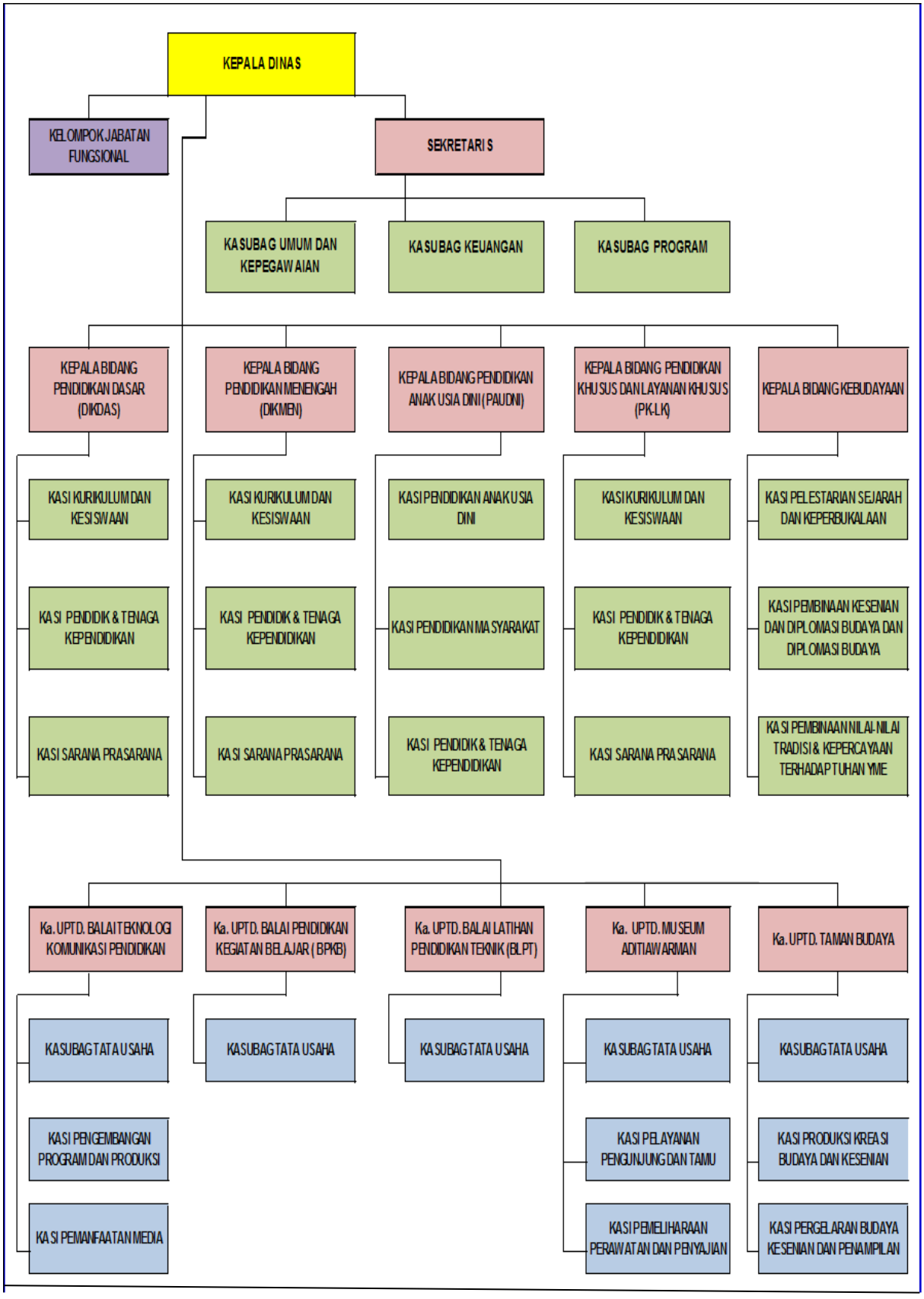

B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

Kepala Dinas

1) Sekretaris terdiri dari :

   a) Subag Umum dan kepegawaian;
   b) Subag keuangan;
   c) Subag Program;

2) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

   a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
   b) Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan; dan
   c) Seksi Sarana Prasarana.

3) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :

   a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
   b) Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan; dan
   c) Seksi Sarana Prasarana.

4) Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus terdiri dari :

   a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
   b) Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan; dan
   c) Seksi Sarana Prasarana.

5) Bidang PAUDNI terdiri dari :

   a) Seksi Pendidik Anak Usia Dini (PAUD);
   b) Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
   c) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK);

6) Bidang Kebudayaan terdiri dari :

   a) Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbukalaan;
   b) Seksi Pembinaan Kesenian dan Diplomasi Budaya;
   c) Seksi Pembinaan Nilai – Nilai Tradisi dan Kepercayaan Terhadap TYME;

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari;

   a) UPT - Balai Telekomunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) ;
   b) UPT - Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) ;
   c) UPT - Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB);
   d) UPT - Taman Budaya;
   e) UPT - Museum Adytiawarman;

8) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah).

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, pada Bab II pasal 4 Uraian Tugas Sekretariat dan bidang sebagai berikut :

1) Sekretariat

a) Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokal, perencanaan makro dan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi,laporan pertanggungjawaban dinas, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan koordinasi Perencanaan dan Program dinas;
2) Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
3) Pengelolaan urusan keuangan,umum dan kepegawaian;
4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pendidikan Dasar.

a) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana.

b) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendidikan Dasar mempunya fungsi sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pendidikn dan tenaga kependidikan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Sarana prasarana dan ;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3) Bidang Pendidikan Menengah.

a) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, Pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana;

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pendidikan dan tenaga kependidikan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Sarana prasarana dan ;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4) Bidang PAUDNI.

a) Bidang PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang PAUD,Pendidikan Masyarakat,Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang PAUDNI mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang PAUD;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pendidikan Masyarakat ;
3) Penyiapan Bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini,Non Formal dan Informal dan pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5) Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

a) Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pendidikan khusus dan layanan khusus;
b) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi ;

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan Pelaksanaan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan ;
2) Penyiapan bahan Perumusan Kebiajakan teknis, pembinaan dan Pelaksanaan di bidang Pendidik dan tenaga Kependidikan ;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana Prasana ;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

6) Bidang Kebudayaan.

a) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintahaan daerah di Bidang Kebudayaan bagi kepentingan pendidikan ;

b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan ;
2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelestaraian sejarah dan kepurbakalaan,pembinaan kesenian,dan diplomasi budaya,pembinaan nilai- nilai tradisi dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas pokok dan fungsi unit pelaksana tugas Dinas ditetapkan dengan peraturan Gubernur No. 85 Tahun 2014. Yakni dengan Melaksanakan sebahagian Tugas Teknis dan Operasional; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Bidangmya , dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatanfungsionalmasing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan struktur dan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Bidang Pendidikan, dinyatakan bahwa dalam tupoksi yang ada telah dapat mendukung kinerja layanan SKPD, namun masih ada benturan tugas dan fungsi, terutama berkaitan dengan kepentingan dan komunikasi kerja. Hala ini lebih banyak disebabkan kepada kompetensi personil dalam mengatasi tugas dan fungsinya masing-masing. Kondisi ini, akan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari SKPD, mengingat besarnya tantangan yang akan dihadapi di masa datang, terutama bahwa secara nasional kebijakan anggaran bukan mengikuti tupoksi *money follow function*, tetapi mengikuti program *money follow programme*.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudyaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup jumlah pegawai negeri, honorer, outsourcing dan asset yang dimiliki sebagaimana tergambar dalam tabel-tabel berikut :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD dan UPT	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	JML	KET
1	Dinas DIKBUD	1	5	17	193	216	
2	UPT Baltekomdik		1	3	11	15	
3	UPT BLPT		1	1	28	30	
4	UPT BPKB		1	1	30	32	
5	UPT Taman Budaya		1	2	39	42	
6	UPT Museum		1	2	28	31	
7	Pengawas Sekolah				20	20	

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1s.d D4	SMA	SMP	SD	JML	KET
1	Dinas DIKBUD	0	41	89	7	78	0	1	216	
2	UPT Baltekomdik	0	6	5	0	4	0	0	15	
3	UPT BLPT	0	2	2	7	19	0	0	30	
4	UPT BPKB	0	4	18	0	9	0	1	32	
5	UPT Taman Budaya	0	1	11	2	23	3	2	42	
6	UPT Museum	0	2	6	1	17	4	1	31	
7	Pengawas Sekolah	0	10	10	0	0	0	0	20	

Tabel II.3
Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing

NO	SKPD dan UPT	ADM/ OPERATOR	KE AMANAN	KE BERSIHAN	LAINNYA	JML	KET
1	Dinas DIKBUD		9	5		14	
2	UPT Baltekomdik		0	1		1	
3	UPT BLPT		4	5		9	
4	UPT BPKB		4	2		6	
5	UPT Taman Budaya		3	4		7	
6	UPT Museum		5	7		12	

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2011-2015 dan menurut SPM untuk urusan wajib, serta indikator kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan, seperti tergambar pada 4 tabel berikut :

Tabel II. 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat Periode 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	PENDIDIKAN FORMAL																	
1	SD																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	95	98%	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.10	98.38	98.81	98.99	99.18	104.36	103.56	102.93	102.05	101.20
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,4%	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	92%	90.12	90.29	91.12	91.75	92.00	73.50	75.60	77.46	85.00	88.60	81.56	83.73	85.01	92.64	96.30
	(d) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	91.65	92.75	94.16	96.89	98.00	86.50	86.90	87.06	87.10	87.17	94.38	93.69	92.46	89.90	88.95
	(e) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.11	92.79	93.17	94.25	95.00	31.59	31.80	-	-	-	34.67	34.27	0.00	0.00	0.00
	(f) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	95	100%	96.51	97.89	98.11	99.14	100.00	95.60	96.10	96.91	98.16	98.92	99.06	98.17	98.78	99.01	98.92
	(g) Jml Siswa per Kls	30-40	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(h) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	90.50	91.00	91.25	93.50	98.90	98.37	97.85	97.07	98.42
	(i) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMP	95	99%	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	101.05	100.57
2	SMP																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.64	90.79	92.22	99.27	99.28	98.51	98.68	99.16	105.61	104.51
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0.4%	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	88.00	88.76	88.88	88.92	90.40	96.70	96.48	95.57	94.60	95.16
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90%	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(e) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	93.00	95.00	96.00	97.00	98.00	93.00	95.00	96.00	97.00	81.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.65
	(f) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	86.63	90.50	-	-	-	95.20	98.37	0.00	0.00	0.00
	(g) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75
	(h) Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMA	70	99%	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	101.28	96.53
3	SMA																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	90	92%	90.25	90.50	91.10	91.60	92.00	68.12	71.38	74.07	81.97	82.05	75.48	78.87	81.31	89.49	89.18
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,6 %	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	131.43	1.58
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	37.30	100.00	100.00	100.00	100.00	39.26
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(e) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(f) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	98 %	92.00	94.00	95.00	97.00	98.00	92.61	92.61	-	-	-	100.66	98.52	0.00	0.00	0.00
	(g) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(h) Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	0.95	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	25	27 %	22.00	25.00	30.00	31.00	35.00	25.52	25.97	26.05	37.00	41.32	116.00	103.88	86.83	119.35	118.06

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	SMK																	
	(a) Angka Putus Sekolah	<1	0.6 %	0.90	0.80	0.70	0.65	0.01	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	110.00	127.14	141.54	9500.00
	(b) Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	62.00	63.00	63.50	64.00	65.00	68.13	68.48	68.28	68.09	68.42
	(c) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	80.00	81.50	82.00	82.40	83.00	97.56	97.02	95.35	93.64	92.22
	(d) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.00	90.00	90.60	91.00	93.60	97.80	97.83	97.42	96.81	98.53
	(e) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.95	92.95	-	-	-	101.04	101.03	0.00	0.00	0.00
	(f) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(g) Jml Siswa per Kls	30-40	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(h) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	20	20 %	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Lulusan yg diterima di Dunia Kerja sesuai Keahlian	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
B	PENDIDIKAN NON FORMAL																	
1	Pendidikan Kesetaraan																	
	(a) Bisa membaca dan menulis	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70
	(b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 Th.	<7	4 %	5.00	4.80	4.60	4.40	4.00	1.50	1.78	0.83	0.65	0.41	30.00	37.08	18.04	14.77	10.25
	© Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 Th.	<30	15 %	20.00	19.00	18.00	16.00	15.00	9.43	7.97	7.89	7.56	7.32	47.15	41.95	43.83	47.25	48.80
2	Program Paket A																	
	(a) Pesrta Paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	85	90 %	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	82.00	83.60	84.70	85.50	86.00	95.35	96.09	96.25	96.07	95.56
	(b) Peserta didik Paket A yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	5.70	4.50	77.78	100.00	100.00	95.00	90.00
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	96.00	97.30	98.20	93.00	94.67	100.79	101.34	101.35	95.53	96.60
	(d) Jml peserta paket A yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	84.60	86.00	86.70	87.90	89.55	88.82	89.57	89.48	90.29	91.38
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket A yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	98.90	98.91	98.92	99.47	99.68
3	Paket B																	
	(a) Pesrta Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	90	92 %	90.25	90.82	91.04	91.70	92.00	83.50	83.60	84.75	85.95	86.88	92.52	92.05	93.09	93.73	94.43
	(b) Peserta didik Paket B yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	6.50	6.70	5.60	4.00	77.78	81.25	95.71	93.33	80.00
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	85.20	87.30	88.20	83.00	84.67	103.90	103.93	102.56	94.32	94.08
	(d) Jml peserta paket B yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	50	60 %	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	50.00	52.60	53.80	54.00	58.75	96.15	97.41	96.07	93.10	97.92
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket B yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	103.89	105.22
4	Program Paket C																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(a) Pesrta Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	70	75 %	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	70.00	72.30	73.50	73.60	74.89	98.59	100.42	100.68	99.46	99.85
	(b) Peserta didik Paket C yg tdk aktif	<5	3 %	4.70	4.20	3.90	3.30	3.00	4.00	4.10	3.60	3.15	2.95	85.11	97.62	92.31	95.45	98.33
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	85 %	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	80.20	81.60	82.00	82.50	80.37	99.01	99.51	98.80	98.21	94.55
	(d) Jml peserta paket C yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	10	15	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	7.50	8.76	9.00	8.80	10.50	68.18	73.00	69.23	62.86	70.00
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket C yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	103.89	105.22
5	Pendidikan Taman Kanak-Kanak																	
	(a) Jml anak usia 4-6 yg mengikuti program TK	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(b) Guru yg layak mendidik TK sesuai dg standar kompetensi Nasional	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	© TK yg memiliki sarpras bermain	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(d) TK yg telah menerapkan manajemen berbasis sekolah	60	70 %	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Indikator Kinrja Kunji (Permendagri 73 Th 2009)																	
1	Angka Rata-rata lama bersekolah	7.4	8.40	9.35	9.70	10.05	8.78	8.88	8.57	8.60	8.63	8.71	8.91	91.66	88.66	85.87	99.20	100.34
2	Angka melek huruf	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92
3	Pembinaan guru jenjang SD	35%	40.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	35.00	36.00	37.50	38.00	39.00	97.22	97.30	98.68	97.44	97.50
4	Pembinaan guru jenjang SMP	46%	50.00	47.00	48.00	49.00	49.50	50.00	46.00	46.70	47.00	48.76	49.67	97.87	97.29	95.92	98.51	99.34
5	Pembinaan guru jenjang SMA/SMK	37%	40.00	37.98	38.25	38.89	39.25	40.00	35.00	36.20	37.60	38.90	39.58	92.15	94.64	96.68	99.11	98.95
6	APM SD/MI/Paket A	95%	98.00	99.67	99.75	100.00	100.00	100.00	94.46	94.49	94.48	99.56	99.57	94.77	94.73	94.48	99.56	99.57
7	APM SMP/MTs/Paket B	79%	80.00	78.80	80.35	82.90	83.45	85.00	75.43	80.90	80.95	81.12	81.15	95.72	100.68	97.65	97.21	95.47
8	APM SMA/SMK/MA/Paket C	72%	73.00	62.50	67.50	72.50	75.00	80.00	50.34	69.67	69.88	73.08	73.10	80.54	103.21	96.39	97.44	91.38
9	Angka Putus sekolah SD	<1	0.40	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
10	Angka Putus sekolah SMP	<1	0.40	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
11	Angka Putus sekolah SMA/SMK	<1	0.60	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	131.43	1.58
12	Angka kelulusan SD	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	99.53	96.72	97.99	97.99	96.07	104.49	100.74	101.14	100.66	97.04
13	Angka kelulusan SMP	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	95.16	97.56	99.02	99.95	99.84	99.91	101.61	102.20	102.67	100.85
14	Angka kelulusan SMA/SMK	97%	98.00	97.21	97.32	97.49	97.78	98.00	95.25	99.40	85.39	99.60	99.95	97.98	102.14	87.59	101.86	101.99
15	Angka Melalnjutkan dari SD ka SMP	95%	99.00	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	101.05	100.57
16	Angka Melalnjutkan dari SMP ka SMA/SMK	70%	99.00	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	101.28	96.53
17	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	92%	95.00	92.50	93.00	93.50	94.00	95.00	83.12	87.37	86.88	87.35	91.01	89.86	93.95	92.92	92.93	95.80

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat seperti tergambar pada tabel diatas singkron dengan realisasi pembiayaan/anggaran periode 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (juta rupiah)					REALISASI ANGGARAN (juta rupiah)					RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN					RATA-RATA Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan ADM Perkantoran	2.791	2.412	3.381	3.408	5.411	2.497	2.325	3.114	3.236	4.888	89,5%	96,4%	92,1%	95%	90,4%	2.9	97.1
Penignkatan Sarpras Aparatur	1.333	1.548	3.533	1.899	3.637	1.182	1.465	3.258	1.745	3.129	88,7%	94,7%	92,3%	91,9%	86,1%	2.6	97.4
Peningkatan Disiplin Aparatur	467	267	243	243	290	429	185	241	239	277	91,9%	69,3%	99,2%	98,4%	95,6%	3.4	96.6
Fasilitasi Purna Tugas PNS	-	575	-	-	-	-	575	-	-	-	-	100	-	-	-		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	68	91	93	263	17	55	46	47	206	28,4%	80,9%	50,6%	50,6%	78,4%	3.2	96.8
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	614	910	1.280	1.000	1.090	552	791	1.244	975	961	89,9%	87%	97,2%	97,5%	88,2%	9.3	99.7
Peningkatan PAUD	1.769	491	3.567	1..533	1.810	1.524	437	864	1.457	1.563	86,2%	89%	24,3%	95,1%	86,4%	8.7	99.3
Peningkatan Akses DIKDAS	857	8.812	10.441	8.844	7.960	741	7.854	10.031	8.371	6.381	86,5%	89,2%	96,1%	94,7%	80.2	3.4	97.6
Peningkatan Akses dan Pemerataan DIKMEN	11.315	33.343	26.007	26.190	35.673	10.062	30.751	23.409	21.638	22.517	89%	92,3%	90,1%	82,7%	63,2%	5.9	97.1
Program Pendidikan Berkarakter	1.000	1.416	1.071	991	2.710	802	1.383	960	934	1.293	80,2%	97,7%	89,7%	94,3%	47,8%	3.2	98.8
Peningkatan Pelayanan PNF	2.845	2.434	3.561	4.982	6.562	2.652	2.214	3.399	4.862	4.637	93,3%	91%	95,5%	97,6%	70,7%	4.7	98.3
Peningkatan PLB	2.025	967	1.491	3.917	3.424	1.784	909	1.451	1.864	3.154	88,1%	94%	97,4%	47,6%	92,2%	3.6	97.4
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.967	-	400	-	-	6.457	-	194	-	-	92,7%	-	48,5	-	-		
Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.856	2.171	3.520	5.095	5.509	6.336	2.069	3.350	4.830	4.159	92,5%	95,3%	95,2%	94,8%	75,5%	3.2	96.8
Sekolah Sahabat Regional dan International	21.190	-	-	-	-	12.312	-	-	-	-	58,1%						
Peningkatan Kualitas Pembelajaran	6.552	-	-	-	-	5.362	-	-	-	-	81,9%						
Peningkatan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau	947	-	-	-	-	889	-	-	-	-	93,9%						
Pendidikan Berkarakter	1.000	-	-	-	-	802	-	-	-	-	80,2%						
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	8.377	-	-	-	-	7.870	-	-	-	-	94%						
Peningkatan Sarana dan Prtasarana Olahraga	2.375	-	-	-	-	2.057	-	-	-	-	86,7%						
Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	659	-	-	-	-	639	-	-	-	-	97%						
Peningkatan Penyadaran Pemuda	795	-	-	-	-	569	-	-	-	-	71,6%						
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	2.003	-	-	-	-	1.909	-	-	-	-	95,3%						
Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Budaya	-	-	-	-	132	-	-	-	-	102					77,3%		
Pemberdayaan Lembaga-lembaga Adat, Seni dan Budaya	-	-	-	-	248	-	-	-	-	248					100%		
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	-	446	-	-	-	-	432					96,9%		
Pemberdayaan Lembaga-lembaga Adat, Seni dan Budaya	-	-	-	-	941	-	-	-	-	808					85,9%		

PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (juta rupiah)					REALISASI ANGGARAN (juta rupiah)					RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN					RATA-RATA Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Pendidikan Budaya	-	-	-	-	3.298	-	-	-	-	2.932					88,9%		
Festival Kekayaan Budaya	-	-	-	-	1.130	-	-	-	-	1.022					90,5%		
JUMLAH	82.766	55.414	58.585	58.196	80.533	67.525	51.013	51.560	50.198	58.709	81,6%	92,1%	88,8%	86,3%	72,9%	6.2	98.8

2.4. TANTANGAN dan PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

1) Tantangan

Percepatan pemerataan pendidikan terkendala pada daerah yang sulit dijangkau terutama pada daerah pantai, daerah tepian hutan, daerah perkebunan, dan rumah tangga miskin. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus untuk mengatasi pelayanan pendidikan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Percepatan pencapaian kualitas pendidikan sebagai akibat globalisasi, mengharuskan kita untuk melakukan berbagai penyesuaian, agar tuntutan kualitas sesuai dengan perkembangan masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, praktek pembangunan pendidikan juga harus mengakomodasi prinsip tata kelola yang baik dan transparan.

Kondisi teknologi yang menjadi tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain ; (1) kesenjangan literasi TIK antar Kab/Kota, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi persaingan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) perkembangan penggunaan internet yang dapat menghilangkan batas wilayah dan waktu, untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) dampak negatif perkembangan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma masyarakat.

Semakin bervariasinya kebutuhan akan keterampilan kerja merupakan tantangan baru bagi sekolah kejuruan yang perlu diatasi. Saat bersamaan semakin besarnya arus mobilitas tenaga kerja baik masuk dan ke luar dari provinsi ini, khususnya yang memiliki pendidikan menengah dan tinggi. Selain dari keterampilan kerja, diperlukan pula peningkatan produktivitas tenaga kerja. Disisi lain perubahan harga minyak internasional, juga memberikan tantangan terhadap investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, sehingga permintaan tenaga kerja juga semakin tidak jelas. Rendahnya daya saing tenaga kerja, juga menjadikan tantangan tersendiri.

2) Peluang

Secara historis, masyarakat Sumatera Barat sudah banyak menghasilkan kaum intelektual dan telah memberikan konstribusi terhadap perkembangan bangsa dan negara. Kondisi demikian mendorong generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini

terlihat dari semakin banyaknya tamatan yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu di Indonesia.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya teknologi dan semakin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi, menyebabkan kebutuhan akan pelayanan pendidikan dibidang tenologi dan informasi semakin tinggi, sehingga pada masa yang akan datang pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI) menuntut ketersediaan SDM dan perangkat yang diperlukan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan berkembangnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi didalam negeri, menyebabkan tingginya kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terampil. Disamping itu, masyarakat Sumatra Barat dikenal memiliki jiwa wirausaha serta manusia yang cerdas dan ulet.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kondisi Saat Ini

1. Pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2010-2015 telah menempatkan Sumatera Barat masih di bawah provinsi yang dijadikan pembanding, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Yogyakarta, meskipun secara umum terlihat bahwa posisi Sumatera Barat sudah lebih baik dari kondisi rata-rata Indonesia. Diantara komponen yang lazim dinilai, pencapaian lama ber sekolah lebih pendek bila dibandingkan dengan Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, pembangunan manusia di Sumatera Barat cukup berhasil mengurangi angka melek huruf dibandingkan dengan daerah lain. Pencapaian indikator pada sub sektor kesehatan masih menunjukkan tendensi yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya, namun perpanjangan usia harapan hidup adalah sesuatu prestasi yang tidak dapat diabaikan. Secara singkat, dari perkembangan capaian IPM, komponen pencapaian derajat kesehatan menduduki persoalan utama, kemudian diikuti penyelesaian pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat.

Grafik III.1
Perkembangan Pencapaian IPM, 2010-2015*

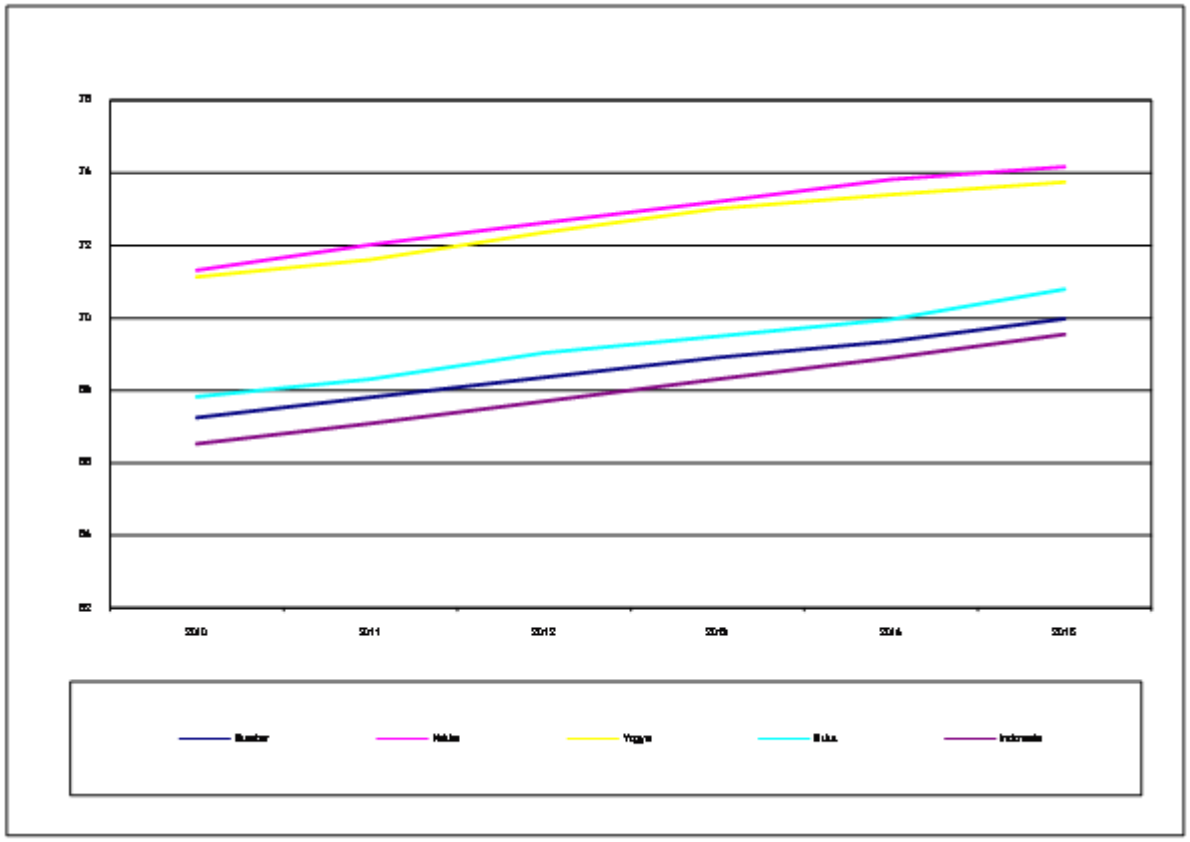

2. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah pada daerah terisolir, anak marjinal/anak jalanan baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian aksesibilitas diperlihatkan dari seberapa tinggi pencapaian APK/APM dan rata-rata lama bersekolah. Target MDGs di bidang pendidikan, mengharapkan seluruh anak usia sekolah mesti tertampung melalui sistem pendidikan yang ada. Sementara output dari pencapaian pemerataan pendidikan adalah semakin tingginya tingkat rata-rata lama sekolah. Target pencapaian lama sekolah penduduk adalah selama 10,75 tahun, dan diharapkan dapat dicapai tahun 2021.

Grafik III.2a.
Rata-rata Lama Sekolah

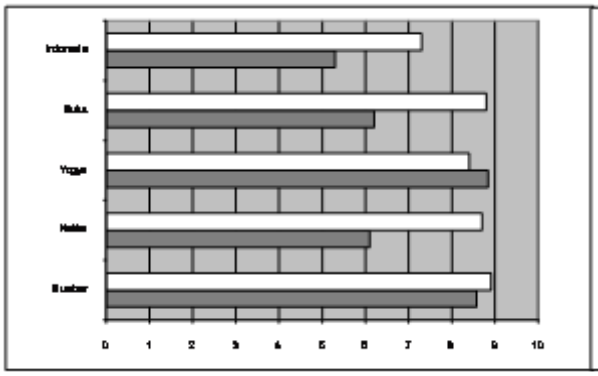

Grafik III.2b
Persentase Melek Huruf

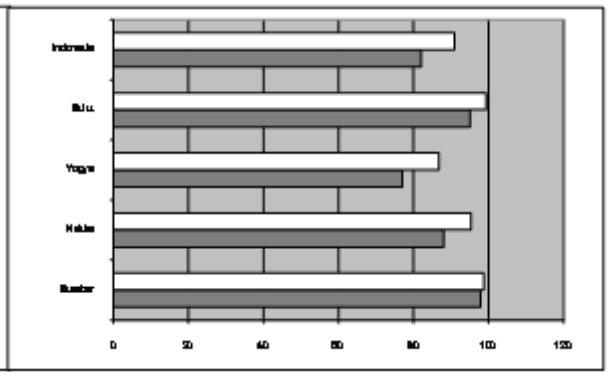

= 2011, = 2015

3. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat adalah peningkatan fasilitas pendidikan dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Selain dari itu, telah pula dilakukan program yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan, baik melalui upaya pemberdayaan institusi pendidikan maupun melalui skema pengembangan jaringan sosial yang ditujukan untuk perluasan akses pendidikan, seperti pemberian beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tingkat yang lebih mikro, upaya untuk mengatasi pemerataan pendidikan dan perluasan akses telah dikembangkan pula melalui pengembangan pendidikan lifeskill/kecakapan hidup serta Paket A, B dan C.

4. Untuk pencapaian kemampuan membaca dan menulis penduduk dewasa justru lebih tepat dijadikan sebagai dasar mereview kinerja sektor pendidikan untuk kepentingan pembangunan pendidikan jangka panjang. Sampai tahun 2011, angka melek huruf di Sumatera Barat, telah mencapai 98.70%. Pencapaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Sulawesi Utara, namun lebih baik dibanding Yogyakarta atau tingkat capaian nasional sekalipun. Demikian juga, pencapaian rata-rata pendidikan penduduk dewasa telah mengalami peningkatan yang cukup berarti selama 15 tahun yakni dari 6 tahun, ekuivalen tamat pendidikan dasar, menjadi 8,91 tahun ekuivalen dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Dengan arti kata untuk memperpanjang lama sekolah masyarakat selama 1 tahun waktu yang dibutuhkan mencapai 9 tahun.

5. Kualitas pendidikan selama ini dilihat dari aspek kognitif. Hasil kompilasi data Nilai Ebtanas Murni (NEM) menunjukan bahwa pada umumnya pencapaian mutu SLTA di Sumatera Barat berada di bawah rata-rata pencapaian secara nasional. Seperti terlihat pada Tabel 1 bahwa kualitas dan

kinerja pencapaiannya masih belum memuaskan. Khusus data hasil proses belajar mengajar tahun 2010 s/d 2015, pencapaian mutu pada jenis dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
DATA CAPAIAN HASIL BELAJAR

NO	UN	2011	2012	2013	2014	2015	KET
1	SD/MI	6,98	7,50	-	-	-	2013-2015 UJIAN SKLH (US)
2	SMP/MTs	6,90	5,78	6,24	6,35	6,21	
3	SM/MA	6,53	5,92	5,90	6,09	6,24	
4	SMK	5.97	5.89	6,09	6,03	5,02	

6. Salah satu persoalan dalam kualitas pendidikan di Sumatera Barat adalah belum meratanya pencapaian kualitas hasil belajar, baik perbedaan kualitas antar sekolah maupun antar kab/kota. Kemudian masih sangat tajam *gap* pencapaian hasil belajar antara penyelenggaraan sekolah negeri dan swasta, dimana secara umum hasil belajar sekolah swasta lebih rendah dibandingkan dengan negeri. Hal tersebut disebabkan antara lain : keterbatasan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan.Persoalan pendidik dari aspek pemerataan, bukan saja dari segi jumlah guru yang diperlukan, tetapi juga terkait dengan ketimpangan distribusi dan kompetensi pendidik pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan.

7. Masalah kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ternyata masih lebih banyak pendidik berkualifikasi non S1 khususnya guru SD. Disisi lain, guru yang memenuhi kualifikasi lebih banyak di daerah perkotaan yang menyebabkan pencapaian mutu relatif lebih baik. Salah satu penyebab adalah pada saat perekrutan dan penempatan yang tidak tepat. Dapat disimpulkan bahwa persoalan pemerataan kualitas pendidikan juga persoalan pemerataan ketersediaan guru yang berkualitas.

Grafik III.3
Kualifikasi Pendidikan Guru Menurut Jenjang Penugasan

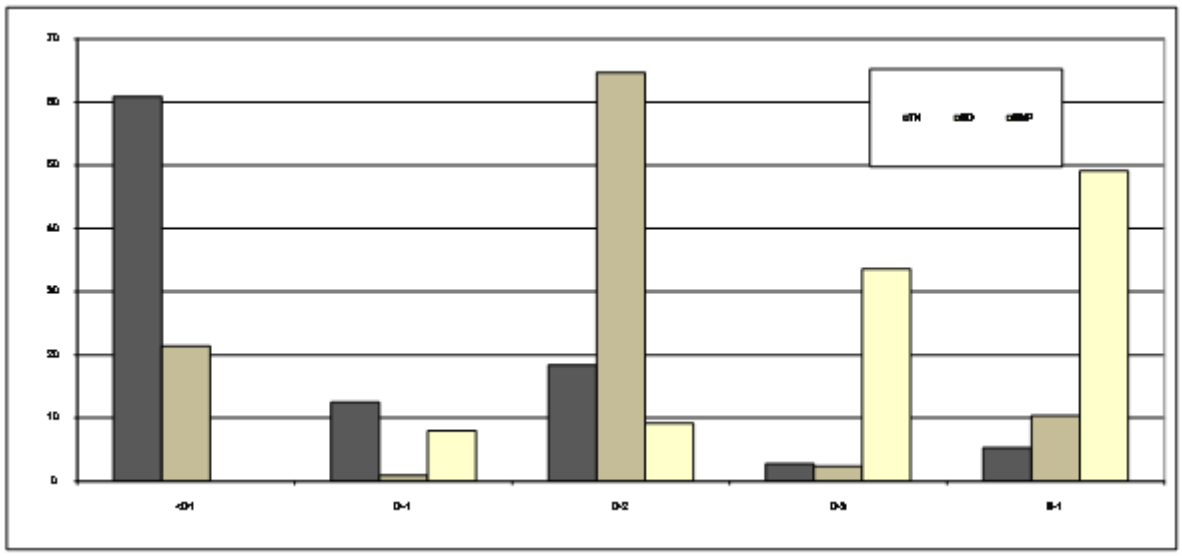

8. Disisi lain, masalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan mulai dari transparansi, akuntabilitas publik, demokrasi, dan pertanggungjawaban hasil pendidikan masih belum memuaskan. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah persoalan in-efisiensi dalam kaitannya dengan angka ketidaklulusan siswa. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa secara umum angka ketidaklulusan SMP mencapai 5,8%. Dan tidak efisien relatif tinggi ditemukan pada jenjang pendidikan SMP swasta, dimana 32,2% anak didik yang tidak mampu lulus. Upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pada level sekolah adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan komite sekolah.

Tantangan

1. Percepatan pemerataan pendidikan terkendala pada daerah yang sulit dijangkau terutama pada daerah pantai, daerah tepian hutan, daerah perkebunan, dan rumah tangga miskin. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus untuk mengatasi pelayanan pendidikan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

2. Percepatan pencapaian kualitas pendidikan sebagai akibat globalisasi, mengharuskan kita untuk melakukan berbagai penyesuaian, agar tuntutan kualitas sesuai dengan perkembangan masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, praktek pembangunan pendidikan juga harus mengakomodasi prinsip tata kelola yang baik dan transparan.

3. Kondisi teknologi yang menjadi tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain ; (1) kesenjangan literasi TIK antar Kab/Kota, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi persaingan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) perkembangan penggunaan internet yang dapat menghilangkan batas wilayah dan waktu, untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) dampak negatif perkembangan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma masyarakat.

4. Semakin bervariasinya kebutuhan akan keterampilan kerja merupakan tantangan baru bagi sekolah kejuruan yang perlu diatasi. Saat bersamaan semakin besarnya arus mobilitas tenaga kerja baik masuk dan ke luar dari provinsi ini, khususnya yang memiliki pendidikan menengah dan tinggi. Selain dari keterampilan kerja, diperlukan pula peningkatan produktivitas tenaga kerja. Disisi lain perubahan harga minyak internasional, juga memberikan tantangan terhadap investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, sehingga permintaan tenaga kerja juga semakin tidak jelas. Rendahnya daya saing tenaga kerja, juga menjadikan tantangan tersendiri.

Potensi

1. Secara historis, masyarakat Sumatera Barat sudah banyak menghasilkan kaum intelektual dan telah memberikan konstribusi terhadap perkembangan bangsa dan negara. Kondisi demikian mendorong generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini terlihat dari

semakin banyaknya tamatan yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu di Indonesia.

2. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya teknologi dan semakin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi, menyebabkan kebutuhan akan pelayanan pendidikan dibidang tenologi dan informasi semakin tinggi, sehingga pada masa yang akan datang pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI) menuntut ketersediaan SDM dan perangkat yang diperlukan.

3. Tingginya pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan berkembangnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi didalam negeri, menyebabkan tingginya kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terampil. Disamping itu, masyarakat Sumatra Barat dikenal memiliki jiwa wirausaha serta manusia yang cerdas dan ulet.

3.2. TELAAHAN PROGRAM KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Gambaran pencapaian Kinerja Makro Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2011-2015, secara umum menunjukkan hasil yang baik, antara lain dapat dilihat dari perluasan dan pemerataan akses ; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing ; tata kelola dan akuntabilitas. Meskipun demikian, pada periode yang bersamaan, masih ditemukan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan di Sumatera Barat dapat dilihat dari pencapaian angka partisipasi kasar (APK). Adapun pencapaian APK SD/SDLB/MI/Paket A, tahun 2011 dari target 118.48 % ternyata mencapai 111,91 %. Selanjutnya dari tahun 2012 sampai tahun 2015 realisasi indikatornya selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti dan berdampak positif terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, juga menunjukkan keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi APK tahun 2010-2015 sudah melampaui target dari yang direncanakan, yaitu tahun 2011 target 98.92 %, ternyata mencapai 92.96 % dan seterusnya tahun 2015 target 104.92 % ternyata mencapai 105,01 %.

Pada jenjang pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C, masih memerlukan perhatian karena pencapaian realisasi APK belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2011 dengan target 84,33 % terealisasi 67,42 %, selanjutnya tahun 2015 dengan target sebesar 86 % hanya terealisasi sebesar 96,65 %.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan menggambarkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat terlihat pada Tingkat SD/SDLB/MI/Paket A dari tahun 20011-2015, dengan realisasi pencapaian indikator pembangunan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target yang direncanakan, seperti terlihat pada Tabel. 2 berikut :

Tabel III.2

Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan Tahun 2011 – 2015

Indikator Kinerja		Sat	2011		2012		2013		2014		2015	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)												
1	SD/MI/SDLB/PaketA A	%	118,48	111,91	119,42	111,94	120,44	111,95	121,92	116,42	22,10	116,48
2	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	98,92	92,96	100,42	93,51	101,92	93,68	103,42	104,76	04,92	105,01
3	SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	84,33	67,42	84,75	86,75	85,16	86,94	85,58	96,64	86	96,65
b. Angka Partisipasi Mumi (APM)												
1	SD/MI/SDLB/Pake A	%	99,67	94,46	99,75	94,49	100	94,48	100	99,56	100	99,57
2	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	78,80	75,43	80,35	80,90	82,90	80,95	83,45	81,12	85	81,15
3	SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	%	62,50	50,34	67,50	69,67	72,50	69,88	75	73,08	80	73,10
c. Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/ Diploma IV												
1	SD	%	15,00	15,00	17,50	17,50	20,00	14,79	22,50	16,49	25,00	20,00
2	SMP	%	74,13	74,13	80,38	80,38	86,63	56,33	92,88	59,94	00,00	86,03
3	SMA	%	83,12	83,12	87,37	87,37	91,62	86,88	95,87	87,35	00,00	91,01
4	SMK	%	81,51	81,37	86,26	66,26	91,01	82,40	95,76	85,00	00,00	91,01
	Rata-rata lama sekolah warga masyarakat	th	9,35	8,57/ 8,20	9,70	8,60/ 8,27	10,05	8,63/ 8,28	8,78	8,71/ 8,29	8,88	8,91/ 8,42
d. Sertifikasi Guru (Pem. Pusat)												
1	TK	Org	-	6	30	30	30	38	40	84	50	30
2	SLB	Org	-	5	30	30	30	23	40	74	50	30
3	SD/MI	Org	-	65	500	500	600	1.870	700	3.175	2.500	600
4	SMP/MTs	Org	-	84	1.240	1.240	1.440	1.499	1.620	2.458	2.900	1.440
5	SMA/SMK/MA	Org	-			1.700		1.743		2.889		2.400
e. Persentase penduduk Buta Huruf menurut kelompok umur												
	15+	%	4,12	4,12	3,90	3,90	3,34	3,14	2,83	2,83	2,50	2,50
	15 - 44	%	1,50	1,50	1,78	1,78	0,83	0,83	0,65	0,65	0,41	0,41
	45 +	%	9,43	9,43	7,97	7,97	7,99	7,89	7,86	7,56	7,32	7,32

Pada tahun 2011 dengan target APM SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 99.67 % terealisasi 94,46 %, seterusnya 2015 target 100 % mencapai sebesar 99,57 %. Tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga mengalami hal yang sama dengan tingkat pendidikan SD/MI/Paket A. Pada tahun 2011 dicapai realisasi 74,13 % dari target 74,13 % dan tahun 2015 target 100 % mencapai 91,01 %. Tingkat SMA/MA/SMK/Paket C rata-rata setiap tahunnya pencapaian realisasi juga melebihi target yang telah direncanakan.

Untuk indikator Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/Diploma IV, pada setiap jenjang tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dalam kurun waktu 2011/2015, dapat digambarkan realisasi pelaksanaannya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait pada tahun-tahun mendatang, sehingga pencapaian realisasi dapat memenuhi target yang telah direncanakan.

Pada Indikator Sertifikasi Guru dari evaluasi kinerja secara makro berdasarkan Tabel 2.13. menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK, SLB, SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2011-2015, realisasi pelaksanaan program selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data indikator makro pada tabel di atas, realisasi kegiatan dari tahun ke tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 2015, menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Selain itu, sampai dengan tahun 2015, terjadi peningkatan terhadap rata-rata lama sekolah menjadi 8,48 tahun.

Keberhasilan Pembangunan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan Sumatera Barat kurun waktu 2011 sampai 2015, dapat dilihat dari dua aspek, ***pertama*** ; keberhasilan dalam rangka penyusunan dan peletakkan kerangka dasar kebijakan pembangunan pendidikan Sumatera Barat 2011-2015, dan ***kedua*** ; keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, dapat dalam bentuk output maupun dampak dari suatu proses pelaksanaan program kegiatan pendidikan 2011-2015 sebagai berikut:

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Membangun SDM Berkualitas.

Meskipun kebijakan agenda membangun SDM berkualitas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2011-2015, ditetapkan pada tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 4 Tahun 2007, namun penyusunan konsep perlunya membangun SDM berkualitas beserta agenda pembangunan lainnya sudah dimulai pada tahun 2011. Artinya pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah berupaya sedini mungkin untuk mengedepankan pengembangan SDM masyarakat Sumatera Barat yang berkualitas sebagai penopang keberhasilan pembangunan sektor lainnya.

Penyusunan dan penetapan perlunya membangun SDM yang berkualitas yang dilakukan pada tahun 2011-2015 merupakan sebuah cacatan keberhasilan yang cukup subtansial dibidang pendidikan di Sumatera Barat, karena dalam kondisi pemulihan akibat resesi ekonomi serta keterbatasan pendapatan asli daerah, Pemerintahan Sumatera Barat mampu melahirkan dan menatapkan kebijakan terobosan yakni ; Membangun SDM Berkualitas sebagai agenda kedua dari tujuh agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015, serta memposisikan sektor Pembangunan Pendidikan sebagai program utama dalam pembangunan SDM masyarakat Sumatera Barat yang berkualitas.

Kebijakan Anggaran Pendidikan (Sumber APBD Provinsi)

Diawali pada tahun 2011, kebijakan penganggaran untuk pendidikan turun dari 5,39 % menjadi 3,38 %. Kondisi ini cenderung terus turun sampai tahun 2015, walaupun dalam rentang periode lima tahun tersebut sudah terjadi tiga kali perubahan nomenklatur pada Dinas Pendidikan, yakni pada tahun 2011-2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2013-2014 Dinas Pendidikan sedangkan pada Tahun 2015 menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3

Kebijakan Anggaran Dinas Pendidikan Th. 2010-2015

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH APBD PROV. SUMBAR	JML ANGGARAN (BTL +BL) (Rp)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2011	2.328.265.073.501	125.596.229.642	5,39%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	2012	3.121.167.223.000	105.435.070.349	3,38%	
3	2013	3.183.000.000.000	105.555.188.145	3,32%	Dinas Pendidikan
4	2014	3.608.888.673.830	110.204.890.532	3,05%	
5	2015	4.201.135.376.737	138.027.367.941	3,29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Kegiatan Trobosan ;

1. Komitmen (MoU) Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat 2011-2015.
   Pada tanggal 30 Juni 2006, Pemda Sumatera Barat telah memprakarsai penandatangan komitmen (MoU) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kab/Kota, dengan substansi komitmen meliputi 4 (empat) program prioritas pembangunan pendidikan di Sumatera Barat yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai 2013, yakni :
   1) Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri.
   2) Program rehabilitasi ruang kelas yang dalam keadaan rusak berat dan ringan.
   3) Program penuntasan buta aksara bagi penduduk usia 15 tahun keatas
   4) Program peningkatan kualifikasi guru setingkat S1 atau diploma IV.

2. Pendidikan Al Qur'an

   Pada tahun 2011 Sumatera Barat telah berhasil menetapkan Kebijakan Pendidikan Al-Quran dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2007. Implementasi dari kebijakan ini sampai pada tahun 2013 pendidikan Al-Quran telah dilaksanakan pada satu sekolah di setiap jenjang pendidikan (pilot proyek) di 19 kab/kota se Sumatera Barat.

   Pada tahun 2013 pelaksanaan pendidikan Al'Quran untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan PERGUB No. 70 tahun 2010 tentang kurikulum muatan lokal pendidikan Al Qur'an dan PERGUB No. 71 tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Kurikulum muatan lokal pendidikan Al-Quran.

3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN 2011-2015

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Barat periode 2011-2015 berkembang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini 0-6 tahun yang

terlayani di lembaga PAUD. Pada tahun 2015 APK PAUD Sumatera Barat sudah mencapai 64,40 %, termasuk Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).

Berkembangnya lembaga-lembaga PAUD di Sumatera Barat yang sebahagian besar diselenggarakan oleh masyarakat, baik melalui pendidikan non formal seperti TPA (Taman Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) dan SPS (Satuan PAUD Sejenis), maupun melalui pendidikan formal seperti TK dan RA membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada anak usia dini (0-6 Tahun) untuk dapat mengikuti pendidikan. Data perkembangan lembaga PAUD Sumatera Barat 2011- 2015 sebagai berikut :

Tabel III.4
Data Perkembangan PAUD 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK PAUD	%	48,31	51,75	57,50	61.91	64,40
2	Peserta Didik	Orang	299..459	307.882	313.272	349.061	374.307
	a. TPA	Orang	1.162	1,224	1.305	1350	2712
	b. KB	Orang	14.015	16,225	17.345	17.880	50.699
	c. SPS	Orang	15.563	16,477	17.655	18.893	14.770
	d. TK/RA	Orang	61.063	63,748	64..239	97.115	69.413
	e. TKLB	Orang	80	92	105	112	125
	f. TPQ	Orang	207.576	210.116	212.623	213.711	236.588
3	Siswa Kls. I SD/MI dari TK dan RA	%	51,93	54,14	57,12	64,29	68,04
4	Jumlah Lembaga	Unit	3.203	2.443	3.535	3.626	4.062
	a. TPA	Unit	61	77	82	89	99
	b. KB	Unit	982	1,025	1.044	1.078	1.262
	c. SPS	Unit	553	631	647	691	758
	d. TK/RA	Sekolah	1.607	1.714	1.738	1.743	1.918
	e. TKLB	Sekolah	20	20	24	25	25

Upaya pencapaian target untuk pembangunan satu TK untuk satu kecamatan belum terpenuhi, namun perkembangan jumlah TK Pembina Kecamatan di Sumatera Barat ada peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah TK Pembina Kecamatan baru 15 unit dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 29 unit.

2. Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pada tahun 2012 Pemerintah memberikan penghargaan Widyakrama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Riau dan Jawa, karena dinilai ketiga daerah ini konsisten melaksanakan berbagai program Wajib Belajar Pedidikan Dasar 9 tahun dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia 7 sampai 15 tahun, serta mampu memenuhi target nasional yang menetapkan APM untuk SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 98 %, serta untuk APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 95 % atau Tuntas Paripurna.

Berdasarkan Instruksi presiden No. 5 Tahun 2006, penetapan keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di daerah dipergunakan indikator :

a. untuk SD/SDLB/MI/Paket A diukur dengan indikator APM (Angka Partisipasi Murni), yakni jumlah siswa SD+SDLB+MI+Paket A yang berusia 7-12 tahun, dibagi penduduk usia 7-12 tahun kali 100 %

b. untuk SMP/SMPLB/MTs/Paket B diukur dengan indikator APK (Angka Partisispasi Kasar), yakni jumlah siswa SMP+SMPLB+MTs+Paket B dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13-15 tahun dikali 100 %.

Suatu daerah dikatakan Tuntas Wajar Dikdas Sembilan Tahun atau tuntas Paripurna, apabila APM tingkat SD minimal mencapai angka 98 %, sedangkan untuk tingkat SMP pencapaian APK minimal 95%. Perolehan APM SD/SDLB/MI/Paket A, serta APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B Sumatera Barat empat tahun terakhir (2011 s/d 2015), klasifikasi tingkat ketuntasannya sebagai berikut :

a. APM SD/SDLB/MI/Paket A dan Klasifikasi Ketuntasan.

Awal tahun pelajaran 2011- 2015, APM SD/SDLB/MI/Paket A Sumatera Barat sudah mencapai 99.57 %, berkat adanya intervensi program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan APM dengan memperkecil angka putus sekolah melalui program pemberian beasiswa, dan efektifitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dampak dari program kegiatan ini dapat dilihat selama kurun waktu lima tahun APM SD/SDLB/MI/Pakat A Sumatera Barat terus mengalami peningkatan :

Tabel III.5
Perkembangan APM SD/MI/Paket A 2011-2015

No	TH	APM SD/SDLB/MI/PAKET A	KET
1	2011	94,46 %	Tuntas Paripurna
2	2012	94,49 %	Tuntas Paripurna
3	2013	94,48 %	Tuntas Paripurna
4	2014	99,56 %	Tuntas Paripurna
5.	2015	99,57 %	Tuntas Paripurna

b. APK SMP/MTs/Paket B dan Klasifikasi Ketuntasan.

Intervensi berbagai program Wajar Dikdas 9 Tahun baik melalui dana APBD maupun APBN kurun empat tahun terakhir memberikan dampak terhadap peningkatan APK SMP/MTs/Paket B di Sumatera Barat. Hasil penilaian nasional pada awal tahun pelajaran 2010/2011 dengan APK 92.96 % Sumatera Barat berada pada posisi klasifkasi Tuntas Madya, dan tahun pelajaran 2014/2015 mampu ditingkatkan menjadi 105.01 % yang memposisikan Sumatera Barat pada klasifkasi Tuntas Paripurna.

Tabel III.6
Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B 2011-2015

No	Tahun	APK SMP/MTs/ PAkET B	Keterangan Klasifikasi Ketuntasaan
1	2011	92,96 %	Tuntas Madya
2	2012	93,51 %	Tuntas Utama
3	2013	93,68 %	Tuntas Paripurna
4	2014	104,76 %	Tuntas Paripurna
5	2015	105,01%	Tuntas Utama

Kenaikan APK dan APM SMP/MTs/Paket B Sumatera Barat empat tahun terakhir dipengaruhi oleh intensifnya pengembangan program Wajar Dikdas 9 Tahun, baik yang dibiayai dengan dana ABPD maupun APBN, antara lain :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dengan memanfaatkan sharing dana APBD Provinsi dan Kab/Kota ;
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri juga dengan mamanfaatkan sharing dana APBD Provinsi dan Kab/Kota ;
- Rehabilitasi Ruang Kelas yang dibiayai dengan sharing dana APBD Provinsi dan Kab/Kota, serta dana DAK ;
- Pemberian beasiswa/bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMP/MTs dari keluarga kurang mampu, baik melalui dana APBD provinsi, kab/kota maupun APBN ;
- Pengembangan SMP Terbuka dengan dana APBN ;
- Pengembangan SD-SMP Satu Atap (Satap) dengan dana APBN ;
- Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B dengan dana APBD dan APBN ;
- Sosialisasi / penyuluhan Wajar Dikas melalui media cetak dan elektronik ;

Indikator pendamping lainnya, yakni APM SMP/MTs/Paket B Sumatera Barat tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan ; tahun 2011 sebesar 75.43 %, tahun 2012 sebesar 80.90 %, tahun 2013 sebesar 80.95 % dan tahun 2014 sebesar 81.12 % dan untuk tahun 2015 sebesar 81.15 %

3. Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Belajar Pendidikan Menengah.

Meskipun pendidikan menengah tidak termasuk program wajib belajar, namun upaya peningkatan persipasi penduduk usia 16-18 tahun di Sumatera Barat untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah tetap menjadi perhatian. Intensifnya pembangunan USB dan RKB SMA/SMK Sumatera Barat tiga tahun terakhir semata-mata diarahkan pada peningkatan angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di Sumatera Barat disamping upaya melakukan keseimbangan rasio siswa SMK dan SMK.

Indikator nasional yang dipergunakan untuk mengukur pertisipasi belajar pendidikan menengah adalah APK (Angka Partisipasi Kasar), namun dalam penghitungannya kita juga mempertimbangkan APM (Angka Partisipasi Kasar) untuk keperluan perencanaan. Perkembangan APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C (Pendidikan Menengah) Sumatera Barat 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.7

Perkembangan APK SMA/SMA/SMALB Paket C 2011 – 2015

No	Tahun	APK	APM
1	2011	67,42 %	50,34 %
2	2012	86,75 %	69,67 %
3	2013	86,94 %	69,88 %
4	2014	96,94 %	73,08 %
5	2015	96,65 %	73,10 %

Pada tahun 2011 rata-rata APK SMA/MA/Paket C Sumatera Barat baru mencapai angka 67.42 %, namun perlu digarisbawahi, dangan jumlah calon siswa dan akses pendidikan yang relatif besar terdapat di daerah kota, mempengaruhi perolehan APK antara daerah kabupaten dan daerah kota di Sumatera Barat. Data menunjukkan untuk tujuh daerah kota di Sumatera Barat dengan APK rata-rata sudah berada diatas 100 %, oleh kerena itu daerah kota sudah mulai merintis program Wajib Belajar Pendidikan Menengah di daerah masing-masing.

Peningkatan akses penduduk usia 16-18 tahun untuk memperoleh pendidikan menengah di Sumatera Barat dikembangkan melalui program :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK melalui dana APBD Provinsi dan kab/kota ;
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA yang juga dibangun melalui dana APBD Provinsi
- Pengembangan program paket B dengan dana APBD Provinsi dan APBN ;
- Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA dan SMK dengan dana APBN ;
- Pemberian beasiswa SMA/MA dan SMK dengan dana APBN ;

Upaya Pencegahan Putus Sekolah.

Program pendidikan Sumatera Barat 2011-2015 sangat sarat dengan program kegiatan yang berupaya pada pencegahan putus sekolah terutama sekali ancaman terjadinya putus sekolah bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya. Berbagai program pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dikembangkan guna memperkecil angka putus sekolah, baik program yang langsung dibiayai dengan dana APBD Provinsi maupun upaya menunjang keberhasilan program-program yang dibiayai dengan dana APBN.

Data pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu 2011-2015 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.8
Datar Jumlah Beaisiswa 2011-2015

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA	JUMLAH SASARAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Beasiswa bagi siswa SMP/MTs dari keluarga kurang mampu	APBD	27.501	28.430	24.856	25.114	26.410
2	Beasiswa bagi mahasiawa berprestasi dari keluarga kurang mampu (Bantuan Biaya Hidup) di 6 PTN	APBD	24	75	111	106	181
3	Bantuan uang kuliah/ biaya mahasiswa miskin berprestasi di Kairo-Mesir / Timur Tengah	APBD	26	23	31	42	55
4	Pemberian beasiswa SMP Terbuka	APBN	1.506	777	763	712	619
5	Pemberian beasiswa miskin SMP	APBN	-	11.353	18.078	19.901	24.520
6	Bantuan Khusus Murid (BKM) SMA/SMK	APBN	6.377	6.377	8.796	5.807	12.980
7	BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB	APBN	855.439	865.508	861.735	883.040	881.629

Peningkatan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin dari sumber dana APBD Provinsi maupun APBN selama empat tahun terakhir berhasil menurunkan angka putus sekolah di Sumatera Barat, khsusnya pada jenjang pendidikan dasar daan menengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.9
Daftar Prosentase Angka Putus Sekolah 2011-2015

No	Satuan/ Jenjang Pendidikan	Prosentase Putus Sekolah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	0.17 %	0.15 %	0.21 %	0,24 %	0,22 %
2	SMP	0.49 %	0.45 %	0.37 %	0,44 %	0,46 %
3	SMA/SMK	0.87 %	0.88 %	0.89 %	0,92 %	0,95 %

Peningkatan Jumlah Sekolah.

Pada bahagian awal mobilitas kenaikan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, efektif tahun 2011 dan 2015 sebagian besar diarahkan untuk membiayai program kegiatan pengembangan berbagai bentuk akses pendidikan, hususnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP, SMA dan SMK. Kebijakan ini ditempuh mengingat anggaran dekonsentrasi untuk pembangunan USB dan RKB sejak tahun 2011 tidak lagi tersedia. Dalam kurun waktu empat tahun jumlah lembaga persekolahan terus mengalami peningkatan guna memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk mempeloleh pendidikan.

Tabel III.10
Perkembangan Jumlah Lembaga Persekolahan

NO	Satuan Pendidikan	Jumlah Lembaga Persekolahan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TK	1.967	1.706	2.562	2.292	2.292
2	SD	4.125	4.049	4.103	4.125	4.129
3	SMP	747	743	758	759	776
4	SMA	259	261	278	287	307
5	SMK	180	179	179	188	209
6	SLB	123	127	129	132	136

Peningkatan Peserta Didik (Siswa).

Satu hal yang patut dicatat sebagai dampak intensifnya penyedian akses pendidikan di Sumatera Barat tahun 2011-2015 ditandai dengan peningkatan jumlah siswa pada setiap satuan pendidikan empat tahun terakhir. Gambaran kenaikan jumlah siswa sebagaimana tebel berikut :

Tabel III.11
Daftar Perkembangan Jumlah Siswa 2011 - 2015

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa (orang)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TK	68.576	87.806	76.583	75.877	133.694
2	SD	678.504	666.695	647.413	679.739	654.789
3	SMP	206.957	202.789	200.589	208.876	214.584

4	SMA	130.011	129.201	132.264	138.309	138.619
5	SMK	65.570	66.039	69.884	75.589	76.194
6	SLB	5.699	5.721	5.759	5.763	5.820

Berdasarkan hal tersebut bisa simpulkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel III.12
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berkarakter	Terbatasnya kebijakan anggaran untuk Dinas Pendidikan	Terbatasnya anggaran	Tersedianya sumber daya manusia
	Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan			
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan yang Berkarakter	Adanya regulasi yang tidak mungkin menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Regulasi	Adanya Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Pendidikan Karakter

3.4. TELAAHAN RENSTRA K/L

Pilar Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan.

1. *Pendidikan Keaksaraan*

Terkait dengan pendidikan Keaksaraan bagi penduduk dewasa yang belum mampu baca,tulis ,hitung dan berkomunikasi dalam bahasa indonesia di Sumatera Barat, sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat 2011-2015 menargetkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara dapat diturunkan sampai batas 0.02 %, oleh kerena itu upaya dan program yang massal yang efektif dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan atau program pembelajaran bagi penduduk buta aksara agar mampu membaca dan menulis latin, dengan pendanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Beranjak dari data BPS tahun 2011/2012 dengan angka melek huruf yang tertera sebagai indikator HDI angka melek huruf penduduk usia 15 tahun di Sumatera Barat sebesar 96.09 %, ini berarti terdapat terdapat 3.91 % lagi yang masih belum mampu baca tulis. Hasil analisis data yang dilakukan oleh Dinas PendidikanProvinsi Sumatera Barat untuk 3.34 % pendudukan buta aksara ini diperkirakan 130.210 orang yang tersebar di sembilan belas kota dan kabupaten.

Dengan dukungan pendanaan yang relatif besar dari sumber APBD Provinsi pada tahun 2007 kita belajarkan sebanyak 83.883 orang dari 130.210 orang penduduk usia 15 tahun s.d 44 tahun buta

aksara dengan harapan dapat menekan prosentase buta aksara menjadi 3.1 %, dan selanjutnya dengan meningkatkan jumlah sasaran warga belajar tahun 2009 sebanyak 21.023 orang lagi diharapkan penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun keatas yang buta aksara tinggal 0.52 % lagi. Target kita pada tahun 2009 hanya tinggal 0.02 % dengan membelajarkan sisanya sebanyak 25.295 orang.

Perkiraan penurunan angka buta aksara tahun 2011 sampai 2015 berdasarkan realisasi anggaran, dan angka ini dapat saja berobah disebabkan adanya warga belajar yang semula sebagai sasaran tidak mau atau tidak tuntas mengikuti program pelajaran yang posisinya tetap tidak mampu baca tulis, disamping adanya penambahan akibat anak putus sekolah kelas I atau kelas II SD/MI yang tidak mau bersekolah lagi dengan kemampuan baca tulis latin terbatas, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.13
Daftar Jumlah Penurunan Angka Buta Aksara

NO	KAB/ KOTA	PENDUDUK BUTA AKSARA	WARGA YANG TERLAYANI (DIBELAJARKAN)					JUMLAH TERLA-YANI
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	AGAM	9,907	160	6,000	1,650	610	380	8,800
2	PASAMAN	6,458	360	3,000	1,280	930	580	6,150
3	50 KOTA	6,256	230	2,000	1,540	1,050	1,040	5,860
4	KAB. SOLOK	11,792	480	6,000	1,840	1,090	1,400	10,810
5	PDG PARIAMAN	16,020	210	9,000	3,790	790	1,570	15,360
6	PESSEL	16,467	150	9,000	2,210	760	2,090	14,210
7	TANAH DATAR	9,935	140	6,000	1,700	1,320	270	9,430
8	SIJUNJUNG	12,196	180	6,000	1,450	1,890	1,500	11,020
9	MENTAWAI	3,772	150	2,000	750	0	0	2,900
10	PASBAR	10,418	160	5,000	1,990	1,250	1,380	9,780
11	SOLOK SELATAN	4,290	390	1,500	1,120	580	310	3,900
12	DHARMASRAYA	6,800	170	3,000	1,050	780	1,340	6,340
13	BUKITTINGGI	813	120	400	130	140	0	790
14	PADANG	6,951	360	3,000	970	600	50	4,980
15	PDG PANJANG	650	160	200	130	30	0	520
16	SAWAHLUNTO	1,485	210	100	970	20	0	1,300
17	KOTA SOLOK	854	160	300	190	20	0	670
18	PAYAKUMBUH	1,287	160	700	280	120	0	1,260
19	PARIAMAN	4,344	200	3,700	220	70	50	4,240
	JUMLAH	**130,695**	**4,150**	**66,900**	**23,260**	**12,050**	**11,960**	**118,320**
SISA YANG BELUM TERLAYANI (BELUM DIBELAJARKAN)								**12,375**

2. *Pendidikan kecakapan hidup, Taman Bacaan Masyarakat dan Lembaga Kursus*

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah Layanan pendidikan non formal yang bertujuan membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan dan sikap dasar yang erat hubungannya dengan pengembangan diri pribadi yang perduli pada kesehatan baik fisik, mental maupun sosial serta kewirausahaan. Dari tujuannya, maka pelaksanaan pendidikan kecakapaan hidup di Sumatera

Barat bukan saja diaplikasikan pada jalur pendidikan non formal tetapi juga pada jalur pendidikan formal, mulai dari TK sampai pendidikan menengah, khususnya pada satuan pendidikan SMK.

Pada tatanan ruang lingkup yang lebih besar, upaya peningkatan pendidikan kecakapan hidup di Sumatera Barat ditangani lintas sektoral, khususnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas dan badan yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan pendidikan kecakapan hidup. Masalah koordinasi dan singkronisasi penanganan masalah antar SKPD terus ditingkatkan.

Khusus program pendidikan kecakapan hidup yang secara teknis menjadi garapan Disdidkpora, yang dikembangkan melalui pendidikan non formal, angka partisipasi dan lembaga program pendidikan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan baik melalui program KWD dan KWK, KUPP, SP3, dan Lembaga Kepemudaan.

Perkembangan program kecakapan hidup melalui pendidikan non formal Sumatera Barat 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :

Sampai tahun 2011 jumlah lembaga-lembaga lainnya sebagai wahana layanan pendidikan kecakapan hidup juga berkembang cukup baik dan tersebar di berbagai kecamatan di Sumatera Barat, antara lain ; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 268 buah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 153 buah, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 221 buah

Tabel III.14
Jumlah Sasaran Program Kecakapan Hidup

No	Jenis Program Pendidikan Life Skills	Terlayani / Sasaran (orang)					Jumlah 2011-2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	KWK	420	680	710	750	800	3.360
2	KWD	620	715	820	950	980	4.085
	Jumlah	1.040	1.395	1.530	1.600	1.780	7.445

Ket : KWK = Kursus Kewirausahaan Kota, KWD = Kursus Kewirausahaan Desa

Peningkatan Kualifikasi Guru dan Dosen.

3. *Kualifikasi Guru Dari D2/D3 ke S1/Diploma IV.*

Prestasi lainnya dibidang pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya peningkatan kualifikas guru setingkat S1/D-IV murni dibiayai dengan APBD Provinsi yang efektif dimulai sejak tahun 2011 murni dengan memberikan bantuan biaya kuliah bagi guru melanjutkan pendidikannya. Output dari program pemberian bantuan biaya kualiah adalah peningkatan prosentase guru berkualifikasi S1 atau Diploma IV Sumatera Barat empat tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.15
Daftar Kualifikasi Guru S.1

No	Guru	Persentase Guru Dengan Tingkat Pendidikan S1/D-IV				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	10.80 %	14.79 %	16.49 %	16.49 %	31,59 %
2	SMP	50.06 %	56.33 %	59.94 %	59.94 %	73,45 %
3	SMA	84.10 %	86.88 %	87.35 %	87.35 %	92,64 %
4	SMK	81.10 %	82.40 %	85.00 %	85.00 %	86,96 %

Selanjudya dapat diinformasikan guru-guru Sumatera Barat yang sudah sertifikasi, tahun 2011 sebanyak 240 orang, namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi 4.659 orang dan tahun 2013 sebanyak 5.713 orang, diharapkan pada tahun 2016 jumlah guru yang sudah bersetifikasi mencapai 7.164 orang.

4. *Kualifikasi Dosen Dari S2 ke S3.*

Cita-cita untuk mewujudkan 1000 doktor bukan tanpa alasan, dengan perbagai pertimbangan diantaranya adalah peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui peningkatan kualifikasi dosen di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, upaya ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi di Sumatera Barat.

Melalui dukungan dana APBD Provinsi Sumatera Barat, kita telah memberikan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup untuk pada dosen yang melanjutkan pendidikannya dari S2 dua ke S3 yang efektif dilaksanakan kurun tiga tahun terakhir dengan rincian sebagaimana tebel berikut :

Tabel III.16
Daftar Junlah Peserta Beasiwa S.2 ke S.3

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2010	119 orang (baru)	
2	2011	124 orang (baru dan lanjutan)	
3	2012	163 orang (baru dan lanjutan)	
4	2013	S.2 = 13 orang lama dan 18 orang baru S.3 = 76 orang lama dan 86 orang baru	
5	2014		Tidak dianggarkan lagi
6	2015		

Peningkatan Ruang Kelas Kondisi Baik (Layak Pakai) dan Kerusakan Ruang Kelas Pasca Gempa Bumi Tanggal 30 September 2009.

Melalui program rehabilitasi ruang kelas (implementasi komitmen) yang dibiayai sharing dana APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota serta dana DAK, jumlah ruang kelas dalam keadaan baik dan layak pakai tahun 2006 sampai tahun 2008 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 jumlah ruang kelas yang layak pakai mengalami penurunan.

Tabel berikut menggambarkan peningkatan jumlah ruang kelas layak pakai tahun 2011 sampai tahun 2015 setelah kondisi pasca gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, sebagai berikut :

Tabel III.17
Perkembangan Ruang Kelas Kondisi Layak Pakai

No	Satuan/Jenjang Pendidikan	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik (Layak Pakai)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TK	*	*	*	78,52	76,54 %
2	SD	45.90 %	48.75 %	52.05 %	57.92 %	56,77 %
3	SMP	82.23 %	83.42 %	87.08 %	86.88 %	71.70 %
4	SMA	88.01 %	90.61 %	92.63 %	92.42 %	63,57 %
5	SMK	84.85 %	87.84 %	89.18 %	88.92 %	75,46 %
6	SLB	85.74	84.31	82.02	81.45	80.13%

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan SMK Bersetifikat ISO 1900 : 2000.

Meskipun jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI serta SMK bersetifikat ISO di Sumatera Barat masih sangat terbatas, namun dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan Sumatera Barat baik skala nasional maupun global, maka pengembangan RSBI dan sertifikasi ISO sejak tahun 2011 mendapat perhatian serius dan menjadi ikon upaya peningkatan mutu pendidikan Sumatera Barat. Perkembangan sampai tahun 2008 jumlah sekolah yang sudah berpredikat RSBI dan bersetifikat ISO cukup menggembirakan, dan pada tahun 2014 keberadaan RSBI sudah dihapuskan sesuai Keputusan Mahkamah Konsitusi.

Tabel III.18
Daftar Perkembangan RSBI

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	RSBI - SD	0 sekolah	1 sekolah	2 sekolah	-	-
2.	RSBI - SMP	4 sekolah	6 sekolah	7 sekolah	-	-
3.	RSBI - SMA	5 sekolah	6 sekolah	7 sekolah	-	-
4.	RSBI - SMK	5 sekolah	7 sekolah	9 sekolah	-	-

Upaya Peningkatan Rasio Siswa SMK : SMA.

Tahun 2010 Pemerintah Sumatera Barat telah merintis pengembangan program Penelurusan Bakat dan Minat Siswa Kelas III SMP dan MTs yang dibiayai secara penuh melalui dana APBD Provinsi, dan untuk tahun 2011 program ini diteruskan oleh kab/kota, disamping peningkatan akses melalui pembangunan USB dan RKB SMK, serta kegiatan sosialisasi SMK melalui media elektronik dan cetak, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, kurun waktu tiga tahun terdapat kecendrungan membaiknya rasio siswa SMK dengan SMA di Sumatera Barat dengan kondisi ideal yang diharapkan 40 : 60 pada tahun 2010, sementara itu kondisi empat tahun terakhir rasio siswa SMK : SMA Sumatera Barat dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.19
Perkembangan Rasio Siswa SMK : SMA

No	Tahun	Perbandingan Siswa SMK : SMA	Rasio Siswa SMK : SMA
1	2010	44.342 : 106.561	29 : 71
2	2011	47.090 : 110.321	30 : 70
3	2012	50.245 : 114.919	31 : 69
4	2013	50.635 : 115.216	32 : 68
5	2014	59.307 : 104.792	34 : 66

Keterangan : Tahun 2010 = Tahun Pelajaran 2011-2014 dan seterusnya.

Untuk mewujudkan kondisi edeal dengan rasio 40 : 60 bukanlah hal sederhana, karena ini menyangkut hak asasi lulusan/tamatan SMP/MTs dan masyarakat untuk memilih pendidikan menengah dengan bebas, namun demikian dengan berbagai upaya peningkatan mutu SMK serta pengembangan akses yang lebih luas, diharapkan mampu memotivasi lulusan SMP/MTs untuk memilih sekolah menengah sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan diharapkan pada tahun 2014 kondisi ideal 40 : 60 dapat diwujudkan.

Peningkatan Kebutuhan Materi Lokal

Merupakan prestasi khusus di bidang pendidikan, Sumatera Barat berhasil menetapkan tiga jenis materi pelajaran guna memenuhi dan memperkaya khsanah materi kebutahan muatan lokal diantaranya adalah :

5. Pendidikan Al-Quran bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat No. 3 Tahun 2007.
6. Integrasi materi Pengetahuan Bencana Alam dengan mata Pelajaran yang relevan bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang pelaksanaannya diimplementasikan dengan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat.
7. Integrasi materi Tertib Lalu Lintas Dengan Mata Pelajaran Relevan (Mou antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Polda Sumatera Barat) yang pelaksanaanya diimplementasikan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat.

Hasil Ujian Nasional

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK tiga tahun terakhir dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penilaian nasional penyelenggaraan UN di Sumatera Barat terlaksana dengan obyektif. Mekanisme perencanaan, pelaksanaaan dan pengawasan yang berlapis baik oleh penyelenggara maupun oleh tim pemantau independen dan pihak-pihak lainnya tidak ditemukan permasalahan yang substansial yang menjurus pada pelanggaran pelaksanaan UN di Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2010/2011 s/d 2014/2015.

Apapun yang kita peroleh dari hasil penyelenggaraan UN di Sumatera Barat merupakan cacatan dari sebuah keberhasilan penyelenggaraan momen pendidikan nasional yang dilaksanakan di daerah

dengan tetap menjaga kerahasian naskah UN, mulai dari proses penggandaan, pendistribusian dan proses penyimpanannya.

Hasil akademis, khususnya tingkat kelulusan UN 2010/2011 s/d 2014/2015 terjadi peningkatan, meskipun prosentase secara kumulatif pada satuan dan jenjang pendidikan tertentu terjadi penurunan. Meskipun batas kelulusan UN mengalami peningkatan setiap tahunnya 2010/2011 s/d 2014/2015 dari 5.25 dan 5.50 disamping peningkatan jumlah peserta, namun persentase kelulusan UN Sumatera Barat cukup baik, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.20
Perkembangan Peserta Lulus UN 2010- 2015

No	Sekolah	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015	
		Peserta	% Lulus	Peserta	% Lulus	Peserta	% ulus	Peserta	% Lulus	Peserta	% Lulus
1	SD	93,503	99,66	98.827	99,16	64.159	79,93	68.045	99,66	100,851	-
2	SLTP	71.069	94.98	72.620	91.81	76.446	91.04	82.551	98.15	91.109	99,85
3	SMA	32.767	95.52	33.763	90.41	68.045	97.10	48.727	98.43	43.020	99.67
4	MA	6.335	87.78	6.842	76.94	6.034	88.82	5.934	96.88	51.812	99.52
5	SMK	13.960	89.60	13.565	85.71	15.893	98,52	17.259	99.04	21.526	99.41

3.4. PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa

kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di masa lima tahun mendatang, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel III.21
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan berdasarkan TUPOKSI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95.6	LPPD	Terbatasnya kewenangan Provinsi terhadap Pendidikan Formal	Sulitnya melakukan MoU terhadap Sharing anggaran dengan KAb/Kota	Jangkauan Kewenangan terhadap Satuan Pendidikan Formal Terbatas
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	98.02	LPPD	Kewenangan Provinsi dalam peningkatan akses dan mutu terbatas	Adanya temuan dari badan pemeriksaan mengenai HIBAH kepada KAb/Kota	Tidak bisa melaksanakan Hibah kepada Lembaga di Kab/Kota
Sasaran Jangka Menengah dari RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.02	LAKIP	Dinas Pendidikan tidak punya kewenangan terhadap Satuan Pendidikan Formal	Tidak Bisa Memberikan Hibah sesuai dengan Temuan Pemeriksa	Terbatasnya kewenangan Dinas Pendidikan
Sasaran Jangka Menengah pada RENSTRA K/L	98.06	LAKIP	Sulitnya mendata kebutuhan Rill terutama satuan pendidikan	Komunikasi antara Pusan dan Provinsi belum berjalan sesuai idealnya	Tidak maksimalnya pelayanan K/L terhadap Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan identifikasi masalah seperti tabel diatas maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kedepannya pada era 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Tabel III.22
Isu-Isu Strategis yang Akan Ditangani
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2021

1	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan
2	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
3	Penumbuhan Karakter Melalui Layanan Pendidikan
4	Tata Kelola dan Revitalisasi Kelembagaan Pendidikan

BAB IV

VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1. VISI DAN MISI

Pengembangan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari pengembangan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021, yakni **"**Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera", serta diselaraskan dengan visi pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 2025, yakni untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan paripurna).

Filosofi yang mendasari pembangunan pendidikan Sumatera Barat adalah *Alam Takambang Manjadi Guru* dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah* yang memaknai bahwa setiap individu dapat belajar dari sumber belajar yang tidak terbatas dan dapat diperoleh dimana dan kapan saja. Alam takambang yang dimaksud adalah sumber belajar, dapat dalam bentuk pembelajaran dari kehidupan duniawi pada satu komunitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Oleh kerena itu pendidikan bagi masyarakat Sumatera Barat sebagai sebuah kebutuhan, karena individu yang relegius dan beradat sekaligus adalah individu yang berpendidikan. Kurikulum nasional yang kita kembangkan sekarang ini justru meletakkan keseimbangan pembelajaran antara aspek relegius (keimanan/ketakwaan, moral dan etika) dengan aspek logika dan estetika yang sebetulnya dapat saja diperoleh melalui sumber belajar pendidikan formal maupun non formal.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumatera Barat pada tatanan strategis jangka menengah, Dinas Pedidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi 2016-2021 untuk *"Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat Yang Cerdas, Berbudaya, dan Berdaya saing"*.

Tabel IV.1

Makna SDM Sumatera Barat Yang Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Makna SDM yang Cerdas, dan Berbudaya		Makna Berdaya Saing
SDM Cerdas		• Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi Mandiri • Pantang menyerah • Pembangun dan Pembina jejaring • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorentasi global Pembelajaran sepanjang hayat
1. Cerdas spritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuh dan memperkuat keimanan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan berkepribadian unggul.	
2. Cerdas emosional dan sosial	• Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. • Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (1) membina dan memupuk hubungan timbal balik ; (2) demokratis ; (3) empatik dan simpatik ; (4) menjunjung tinggi hak asasi manusia ; (5) ceria dan percaya diri ; (6) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara ; (7) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara	
3. Cerdas intelektual	• Berakatualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kretaif, inovatif dan imajinatif	
4. Cerdas kinestetis	Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, dan terampil	
Berbudaya	Pemahaman dan Pengamalan aspek budaya hasil cipta, karsa dan rasa yang masyarakat Sumatera Barat yakini sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna.	

Dengan tetap memperhatikan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi pendidikan yang dititik beratkan pada tatanan biokrasi yang lebih dekat dengan rakyat, pembangunan sektor pendidikan, Provinsi Sumatera Barat lebih menekankan pada pendidikan transpormatif lintas wilayah kabupaten/kota, yaitu pendidikan sebagai motivator penggerak pembinaan dan pengembangan lintas wilayah yang berupaya melakukan perobahan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam mendukung :

VISI Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021

"Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

beserta

MISI Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*
2. Meningkatkan tata Pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.*
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Untuk terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, dan berdaya saing dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2016 – 2021), maka pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada *penguatan peningkatan layanan pendidikan, yang bermutu di semua kabupaten/kota.* Sejalan dengan fokus tersebut, maka

VISI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat periode 2016-2021

"Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sumatera Barat yang Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing"

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berbudaya, dan Berdaya Saing adalah :

(1) **Cerdas** adalah orang yang telah mampu menyeimbangkan dorongan-dorongan dalam dirinya, sehingga mewujudkan tingkahlaku yang harmonis. Ia mampu berhubungan dengan lingkungannya, mampu menciptakan suasana aman dan harmonis. Ia tidak agresif, tidak mengasingkan diri dari lingkungannya, dan hidupnya tidak pula bergantung pada orang lain.

(2) **Berbudaya** yakni, hasil cipta karsa dan rasa masyarakat Sumatera Barat yakini sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna, serta diperkuat dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

(3) **Berdaya saing** adalah kemampuan masyarakat Sumatera Barat dalam memanfaatkan peluang dan tantangan untuk dijadikan kekuatan daya saing pada era global saat ini.

Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di atas dikemas dalam :

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat periode 2016-2021

M 1	*Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan*
M 2	*Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan*
M 3	*Meningkatkan Manajemen Layanan Pendidikan*
M 4	*Meningkatkan Kompetensi, dan Profesionalime Guru dan Tenaga Kependidikan*
M 5	*Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Melalui Layanan Pendidikan*
M 6	*Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Budaya Alam Minangkabau*

4.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

Berdasarkan pengembangan visi dan misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk lima tahun kedepan 2016-2021, maka tujuan strategis yang perlu dicapai dirumuskan berdasarkan satuan dan jenjang pendidikan, sistem tata kelola serta tugas pokok pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang melekat pada fungsi dinas untuk menghasilkan layanan terbaik sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Upaya ini dilakukan guna mendapatkan kejelasan dalam pengukuran kinerja lima tahun kedepan. Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah :

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Sumbar 2016-2021

T 1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah
T 2	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
T 3	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah
T.4	Meningkatkan Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
T.5	Meningkatkan tata kelola dan akuntanbilitas manajemen pendidikan
T.6	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah
T.7	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah luar biasa dan pendidikan layanan khusus
T.8	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter
T.9	Meningkatkan apresiasi budaya alam minangkabau.

Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.2
Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

VISI : *Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat Yang Cerdas, Berbudaya,dan Berdaya saing*			
M1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan	T1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah
		T2	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
M2	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	T3	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah
		T4	Meningkatkan Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
M3	Meningkatkan Manajemen Layanan Pendidikan	T5	Meningkatkan tata kelola dan akuntanbilitas manajemen pendidikan
M4	Meningkatkan Kompetensi, dan Profesionalime Guru dan Tenaga Kependidikan	T6	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah
		T7	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah luar biasa dan pendidikan layanan khusus
M5	Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Melalui Layanan Pendidikan	T8	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter
M6	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Budaya Alam Minangkabau	T9	Meningkatkan apresiasi budaya alam minangkabau.

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimaksud mengacu kepada sasaran makro bidang pendidikan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel IV.3
Sasaran Makro Urusan Pendidikan
RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA
1.	Indek Pembangunan Manusia 72,56
2.	Harapan lama sekolah 15,09
3.	Rata-rata lama sekolah 8,66 tahun
4.	APK PAUD 77,50
5.	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C provinsi mencapai 86 %
6.	APM SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 100 %
7.	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B provinsi mencapai 81,55 %
8.	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C provinsi mencapai 73,35 %
9.	Peringkat UN di tingkat nasional mencapai rangking 8

10.	Angka Putus Sekolah di SMA 0,58
11.	Angka Putus Sekolah SMK 0,68
12.	Angka Kelulusan SMA/MA 99,15 %
13.	Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri 52,05 %
14.	Angka tidak melanjutkan dari SMP ke sekolah menengah 1,92 %
15.	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C provinsi mencapai 73,35 %
16.	Peringkat UN di tingkat nasional mencapai rangking 8
17.	Nilai uji kompetensi guru 86,18
18.	Kompetensi tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan dan Pegawai Tata Usaha) 38,56
19.	Kompetensi tenaga pendidik (Guru SMA/SMK dan PLB) 86,18
20.	Sekolah Menengah dan SLB terakreditasi minimal B 79,74 %
21.	Indek intregritas siswa 85
22.	Persentase guru BK paham terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba 100 %

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian (kinerja) tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diuraikan diatas (T1 s.d T9) diperlukan sejumlah sasaran strategis yang mampu menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021. Sasaraan strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 1 (T1)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah* adalah sebagai berikut :

S1.1	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C provinsi mencapai 86 %
S1.2	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C provinsi mencapai 73,35 %
S1.3	Angka Putus Sekolah di SMA/SMK 0,58
S1.4	Rata-rata lama sekolah Dikmen 8,66 tahun
S1.5	Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah 1,92 %

(2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 2 (T2)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus* adalah sebagai berikut :

S2.1	Peningkatan Pelayanan PK-LK 94,05 %
S2.2	APK SDLB (PK) 100,90 %
S2.3	APK SMPLB (PK) 37, 02 %
S2.4	APK SMALB (PK) 13,51 %

(3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 3 (T3)

Sasaran Staregis untuk *Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah* adalah sebagai berikut :

S3.1	Peringkat UN di tingkat nasional mencapai rangking 8
S3.2	Angka Kelulusan SMA/MA 99,15 %
S3.3	Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri 52,05 %
S3.4	Angka Kelulusan SMK 99,12 %
S3.5	Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri 58 %
S3.6	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B 79,74 %
S3.7	Indek Integritas Siswa 85

(4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 4 (T4)

Sasaran Staregis untuk *Meningkatkan Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus* adalah sebagai berikut :

S4.1	Uji Kompetisi Guru SLB 65,29
S4.2	Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB
S4.3	Akreditasi SLB Minimal B sekurang-kurangnya 52
S4.4	Lulusan SLB 95,03 %

(5) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 5 (T5)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan tata kelola dan akuntanbilitas manajemen pendidikan* adalah sebagai berikut :

S5.1	Kompetensi tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan dan Pegawai Tata Usaha) 38,56
S5.2	Terakreditasinya Sekolah Menengah/SLB minimal B

(6) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 6 (T6)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah* adalah sebagai berikut :

S6.1	Nilai uji kompetensi guru 86,18
S6.2	Persentase guru BK paham terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba 100%

(7) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 7 (T7)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan Sekolah Luar Biasa & Pendidikan Layanan Khusus* adalah sebagai berikut *:*

S7.1	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 72,25
S7.2	Kepala Sekolah memiliki NUKS 90 %
S7.3	Uji Kompetensi Pengawas SLB 74,02

(8) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 8 (T8)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter* adalah sebagai berikut **:**

S8.1	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat
S8.2	Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti
S8.3	Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan (100 %)
S8.4	Indek Itregritas Siswa 85
S8.5	Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya
S8.6	Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami
S8.7	Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau

(9) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 9 (T9)

Sasaran Strategis untuk *Meningkatkan apresiasi budaya alam Minangkabau* adalah sebagai berikut :

S9.1	Penguatan peran lembaga adat, lembaga seni, institusi sekolah dan orang tua dalam ekosistem kebudayaan
S9.2	Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan budaya
S9.3	Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian budaya dan diplomasi budaya
S9.4	Pemakaian bahasa minang pada bahasa pengantar muatan lokal budaya minangkabau dan pada hari tertentu

Untuk pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah dengan mengacu kepada target capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 maka disusunlah target beserta indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam masa periode tahun 2016-2021 yang tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 4

Keterkaitan Tujuan dengan Sasaran dan Target Kinerja 2016-2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

COD	TUJUAN	COD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
T.1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	S1. 1	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C Provinsi	86 %	81.92		83.65	84.11	85.23	86 %
		S1.2	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C Provinsi	73,35 %	63.12	65.24	66.75	68.94	71.15	73,35 %
		S1.3	Angka Putus Sekolah di SMA/SMK	0,58 %	0.81	0.79	0.73	0.63	0.61	0,58 %
		S1.4	Rata-rata lama sekolah Dikmen	8,66 th	8.31	8.35	8.42	8.51	8.59	8,66 th
		S1.5	Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	1,92 %	2.41	2.39	2.11	1.97	1.95	1,92 %
T.2	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	S2.1	Peningkatan Pelayanan PK-LK	94,05 %	87.13	88.26	89.99	91.27	93.11	94,05 %
		S2.2	APK SDLB (PK)	100,90%	91.16	92.74	94.79	96.62	98.17	100,90%
		S2.3	APK SMPLB (PK)	37,02 %	31.11	32.94	34.19	35.82	36.79	37,02 %
		S2.4	APK SMALB (PK)	13,51 %	9.26	10.27	11.02	12.06	13.01	13,51 %
T.3	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	S3 .1	Peringkat UN di tingkat nasional	8	-	-	-	-	-	-
		S3.2	Angka Kelulusan SMA/MA	99,15 %	98.17	98.76	98.91	99.02	99.11	99,15 %
		S3.3	Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri	52,05 %	43.10	44.92	46.13	48.91	50.16	52,05 %
		S3.4	Angka Kelulusan SMK	99,12 %	97.13	97.79	98.26	98.71	98.99	99,12 %
		S3.5	Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri	58 %	26.52	30.14	35.87	40.35.	47.19	58 %
		S3.6	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	79,74 %	58.13	61.32	65.82	71.15	75.79	79,74 %
		S3.7	Indek Integritas Siswa	85	63.19	68.27	71.92	76.34	79.61	85
T.4	Meningkatkan Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	S4. 1	Uji Kompetisi Guru SLB	65,29 %	52,11	54,27	56,91	58,72	61,04	65,29 %
		S4.2	Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	91 %.	63,04	71,19	74,16	81,27	86,92	91 %.
		S4.3	Akreditasi SLB Minimal B sekurang-kurangnya	52 sklh	41,12	44,97	46,13	47,82	49,11	52 sklh
		S4.4	Lulusan SLB	95,03 %	91,17	92,94	93,05	93,97	94,71	95,03 %

T. 5	Meningkatkan tata kelola dan akuntanbilitas manajemen pendidikan	S5.1	Kompetensi tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan dan Pegawai Tata Usaha)	38,56 %	27,23	29,91	33,04	35,17	37,21	38,56 %
		S5. 2	Terakreditasinya Sekolah Menengah/SLB minimal B	90 %	72,14	76,21	78,96	83,71	87,39	90 %
T. 6	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah	S6. 1	Nilai uji kompetensi guru	86,18	71,19	73,36	75,47	79,13	82,74	86,18
		S6. 2	Persentase guru BK paham terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 %	100	100	100	100	100	100 %
T. 7	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah luar biasa dan pendidikan layanan khusus	S7. 1	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 72,25	72,25	52,79	54,12	56,89	58,17	64,82	72,25
		S7. 2	Kepala Sekolah memiliki NUKS 90 %	90 %	72,14	78,11	81,79	83,62	85,79	90 %
		S7. 3	Uji Kompetensi Pengawas SLB 74,02	74,02	61,13	63,79	65,52	67,21	70, 49	74,02
T. 8	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	S8.1	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	100 %	100	100	100	100	100	100 %
		S8. 2	Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti	100 %	100	100	100	100	100	100 %
		S8. 3	Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	100 %	83,17	85,91	87,24	91,53	96,41	100 %
		S8. 4	Indek Itregritas Siswa	85 %	72,29	74,13	76,51	79,62	81,27	85 %
		S8. 5	Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya	100 %	85,27	89,17	92,11	94,56	97,47	100 %
		S8. 6	Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami	12 SKLH	3 sek	11 sek	11 sek	11 sek	11 sek	12 sek
		S8. 7	Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	100 %	71,60	75,16	79,20	84,56	92,89	100 %
T. 9	Meningkatkan apresiasi budaya alam minangkabau.	S9.1	Penguatan peran lembaga adat, lembaga seni, institusi sekolah dan orang tua dalam ekosistem kebudayaan	1100 %	80	84	89	93	95	100 %
		S9. 2	Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan budaya	100 %	100	100	100	100	100	100 %
		S9. 3	Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian budaya dan diplomasi budaya	100 %	100	100	100	100	100	100 %
		S9. 4	Pemakaian bahasa minang pada bahasa pengantar muatan lokal budaya minangkabau dan pada hari tertentu	100 %	100	100	100	100	100	100 %

4.3. **STRATEGI dan KEBIJAKAN STRATEGIS**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapainnya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategis. Maka untuk mencapai sasaran dari setiap tujuan strategis dimaksud, dilakukan berbagai ***strategi dalam penyelenggaraan layanan***

pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, sistem dan prosedur yang jelas, serta apresiasi Kebudayaan.

Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk regulasi yang mengatur kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota.

Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mencapai tujuan strategis 2016-2021 menetapkan arah kebijakan strategis sebagai berikut :

K.1	Perluasan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Menengah
K.2	Perluasan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
K.3	Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Layanan Pendidikan Menengah
K.4	Peningkatan Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
K.5	Peningkatan tata kelola dan akuntanbilitas manajemen pendidikan
K.6	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah
K.7	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus layanan khusus
K.8	Penumbuhan budi pekerti dan pengembangan pendidikan karakter
K.9	Peningkatan pemahaman dan pengamalan budaya alam Minangkabau.

KEGIATAN PRIORITAS

Kegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah yang berkaitan dengan :

1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
2. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
3. Peningkatan Angka Kelulusan SMA
4. Peningkatan Angka Kelulusan SMK
5. Pengurangan Angka Putus Sekolah SMA
6. Pengurangan Angka Putus Sekolah SMK
7. Peningkatan Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Negeri
8. Peningkatan Lulusan SMK yang diterima pada Dunia Usaha dan Industri
9. Peningkatan Sekolah Menengah yang Terakreditasi minimal B
10. Pengembangan Pendidikan Karakter yang Bernuansa Surau
11. Peningkatan dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Berdasarkan ABS-SBK

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN

Rencana program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini disusun untuk mencapai visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran strategis renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk mencapai target-target kinerja pelayanan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021.

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan pendidikan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

P.1	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA
P.2	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK
P.3	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
P.4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
P.5	Program Pendidikan Karakter
P.6	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
P.7	Program Peningkatan dan Penguatan Ekosistem Lembaga-Lembaga Adat dan Seni Budaya
P.8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya
P.9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
P.10	Program Pengembangan dan Penguatan Nilai-Nilai Budaya
P.11	Peningkatan Diplomasi Budaya

Kemudian disusunlah kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2021 untuk setiap programnya, yaitu sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA (P.1)

a) Tujuan Program peningkatan akses, Perluasan dan Mutu pendidikan SMA adalah memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat usia pendidikan menengah terhadap layanan pendidikan yang merata.

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Pembangunan SMAN 1 Sumatera Barat (Lanjutan)
2	Pembangunan SMAN 2 Sumatera Barat (Lanjutan) Barat
3	Pembangunan SMAN 3 Sumatera Barat (Lanjutan)
4	Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 1 Sumatera Barat

5	Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat
6	Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 3 Sumatera Barat
7	Pemeliharaan dan Perawatan WC/ Toilet Asrama SMAN 1 Sumatera Barat
8	Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia SMA Tingkat Provinsi dan Nasional
9	Pelaksanaan FLS2N SMA Tingkat Provinsi dan Nasional
10	Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Provinsi dan Nasional
11	Pelaksanaan OSN SMA Tingkat Provinsi dan Nasional
12	Penyusunan Materi Bencana Alam yang terintegrasi pada Mata Pelajaran di SMA dan SMK
13	Workshop guru Bahasa Inggris SMA (ECAFE Learning/AVI)
14	Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA dan SMK Kelas X Baru
15	Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMA
16	Pengadaan Alat Laboratorium SMA dan SMK
17	Pemasangan *Pavingblock* halaman dan drainase
18	Alat Peraga Pendidikan SMA dan SMK
19	Pengadaan Alat Labor Komputer dan Jaringan
20	Pembangunan Fasilitas Gedung SMA dan SMK
21	Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA dan SMK
22	Pengadaan Moubiler SMA dan SMK
23	Pra UN SMA Tahun Pelajaran 2016/2017
24	Bimbingan Teknis Guru Mata Pelajaran SMA dengan Nilai UN Rendah
25	Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT
26	Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMA
27	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Siswa SMA

2) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK (P.2)

a) Tujuan Program peningkatan kualitas akses, perluasan dan mutu pendidikan SMK adalah memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat usia pendidikan menengah terhadap layanan pendidikan SMK yang berkualitas dan bermutu

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMKN 1 Sumatera Barat
2	Lanjutan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Pustaka SMKN 1 Sumatera Barat
3	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK
4	Praktek Kompetensi Keahlian Siswa SMK
5	Uji Kompetensi Keahlian siswa SMK melalui LSP
6	LCC tentang TAP MPR dan UUD 45 Tingkat SMA dan SMK
7	Pemeliharaan Gedung Praktek (workshop) dan Asrama BLPT
8	Pembangunan Asrama BLPT Tahap III
9	Lomba Debat Bahasa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
10	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
11	Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di BLPT
12	Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di BLPT
13	Bimtek Guru Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian SMK Teknologi Se Sumatera Barat (In and On Service)
`14	Pelaksanaan FLS2N SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
15	Pelaksanaan O2SN SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
16	Pelaksanaan FIKSI SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
17	Penelusuran lulusan SMA dan SMK yang diterima di Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha/ Industri
18	Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECAFE Learning/AVI)
19	Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK
20	Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMK
21	Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK
22	Pra UN SMK Tahun Pelajaran 2016/2017
23	Bimbingan Teknis Guru Mata Pelajaran SMK dengan Nilai UN Rendah
24	Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK
25	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Siswa SMK

3) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (P.3)

a) Tujuan Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk meningkatkan mutu lulusan Pendidikan Menengah dan SLB se Sumatera Barat.

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Peningkatan Kompetensi Guru yang akan mengikuti UKG (Penekanan pada TIK)
2	Rekrutmen dan Pembekalan Guru Inti SMA dan SMK Tingkat Prov. Sumbar
3	Pemberdayaan Forum MGMP SMA Provinsi dan Kab/Kota
4	Pemberdayaan Forum MGMP SMK Provinsi dan Kab/Kota
5	Bimtek PTK bagi Guru SMA
6	Bimtek PTK bagi Guru SMK
7	Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMA Tingkat Provinsi dan Nasional
8	Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
9	Sertifikasi Assesor Kompetensi LSP Bagi Guru SMK
10	Pemberian Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK berprestasi Tingkat Provinsi
11	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
12	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
13	Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Tingkat Provinsi
14	Peningkatan Kompetensi Kepala SMK Tingkat Provinsi
15	Peningkatan Kompetensi Pengawas SMA Tingkat Provinsi
16	Peningkatan Kompetensi Pengawas SMK Tingkat Provinsi
17	Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran SMA Tingkat Provinsi
18	Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran SMK Tingkat Provinsi
19	Pemetaan Kebutuhan Kepala SMA dan SMK
20	Penguatan Kelembagaan dan Pelaksanaan Tupoksi Pengawas SMA dan SMK
21	Alih Fungsi guru Adaptif SMK menjadi Guru Produktif
22	Peningkatan Kompetensi Petugas Tata Usaha SMA Tingkat Provinsi
23	Peningkatan Kompetensi Petugas Tata Usaha SMK Tingkat Provinsi
24	Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMA Tingkat Provinsi
25	Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMK Tingkat Provinsi

4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (P.4)

a) Tujuan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntanbilitas Manajemen Sekolah

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan SNP pada sekolah yang terakreditasi C dan TT
2	Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA
3	Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMK
4	Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi
5	Penataan Kelembagaan SMK se Sumatera Barat
6	Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan
7	Pengelolaan Asrama BLPT
8	Gebyar Pendidikan 2017 dan Sumbar Expo
9	Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko Ijazah SMA/SMK dan Pengandaan Blanko Ijazah SLB
10	Pengelolaan Dana BOS
11	Pengadaan Rapor Siswa SMA, SMK dan SLB
12	Penyusunan Database Pendidikan
13	Penyebaran Informasi Pendidikan melalui WEB
14	Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas
15	Penyusunan Renstra SKPD
16	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Sekolah Sehat SMA dan SMK

5) Program Pendidikan Karakter (P.5)

a) Tujuan Program Pendidikan Karakter adalah untuk Meningkatkan Sikap Sosial dan Spritual Peserta Didik SMA/SMK/SLB

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMA
2	Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMK
3	Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMA dalam pencegahan Narkoba
4	Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMK dalam pencegahan Narkoba
5	Kegiatan tahfis Al-Quran pada 10 sekolah Boarding School
6	Kegiatan tahfis Al-Qur'an pada 8 sekolah Fullday
7	Penyusunan Buku Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Al-Qur'an dan BAM ke dalam Pembelajaran SMA dan SMK
8	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA dan SMK
9	Bimtek Pelaksanaan Muatan Lokal bagi Guru SMA dan SMK Piloting
10	Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Nasional yang Berintegritas SMA dan SMK

6) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. (P.6)

a. Tujuan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah peningkatan akses, pemerataan dan mutu pendidikan Khusus dan Layanan Khusus untuk memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang berkebutuhan khusus terhadap ketersediannya pendidikan khusus yang berkualitas dan bermutu.

b. **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	US SDLB dan UAS SLB Tahun Pelajaran 2016 / 2017
2	FLS2N SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional
3	O2SN SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional
4	Lomba Keterampilan dan Lomba Literasi SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional
5	Seleksi, Pembekalan, dan Penghargaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)
6	Validasi dan Evaluasi KTSP SLB
7	Biaya Pengelolaan SLB Negeri Sumatera Barat
8	Biaya Pengelolaan Sekolah Keterbakatan Olahraga
9	Pembinaan dan Pengembangan KKKS dan KKG SLB
10	Penataan Kelembagaan SLB Negeri
11	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SLB
12	Pengadaan Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Busana, Tata Rias) SLB
13	Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SLB
14	Peningkatan Kompetensi Guru Keterampilan SLB
15	Peningkatan Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan)
16	Rekruitmen dan Pelatihan Calon Kepala SLB
17	Rekruitmen dan Pelatihan Calon Pengawas SLB
18	Pemantapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sedangkan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Penguatan Ekosistem Lembaga-lembaga Adat, Seni Budaya (P.7)

a) Tujuan Peningkatan dan Penguatan Ekosistim Lembaga-Lembaga Adat dan Seni Budaya adalah Pemberdayaan Lembaga Adat dan Seni Budaya sesuai dengan fungsinya

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Pembinaan dan Pemberdayaan Pemangku Adat
2	Temu Konsultasi Ketua KAN dan Bundo Kanduang
3	Koordinasi dan Asistensi Lembaga Adat
4	Advokasi bagi Lembaga Adat
5	Peningkatan Kapasitas LKAAM dan Bundo Kanduang
6	Pengembangan Sanggar-Sanggar Seni Melalui Taman Budaya
7	Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni dan Budaya
8	Peningkatan Kompetensi Pemangku Adat
9	Peningkatan Apresiasi melalui Pameran dan Pegelaran Karya Seni
10	Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui Lomba/Festival tingkat Daerah dan Nasional
11	Pendataan Group Kesenian
12	Bimtek Pengelolaan Manajemen Sanggar
13	Festival Seni Tari
14	Lomba Paduan Suara Antar Komunitas
15	Lomba Shalawat Dulang
16	Festival Teater
17	Festival Randai
18	Festival Lomba Berbalas Pantun
19	Lomba Baca Puisi
20	Monev Pembinaan Kesejarahan dan Benda-Benda Keperbukalaan Daerah dan Nasional

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya (P.8)

a) Tujuan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya adalah Peningkatan Apresiasi Budaya

b) **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Peningkatan Kompetensi Rang Mudo dalam Pasambahan Adat Minang
2	Penyusunan Buku Kearifan Lokal
3	Aktivitas Sekolah Binaan Bundo Kanduang
4	Peningkatan Kompetensi Puti Bungsu
5	Lomba Berpakaian Baju Kuruang Basiba dan Taluak Balango
6	Peningkatan Kompetensi Kader Panghulu
7	Pemilihan dan Pembinaan Duta Budaya Minangkabau
8	Bimtek Manajemen Seni Pertunjukan
9	Pameran Koleksi Musium Daerah Regional, Nasional dan Internasional
10	Penyusunan Penyebaran Informasi Koleksi Musium
11	Peningkatan Fasilitas Musium
12	Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya bagi Generasi Muda
13	Pembinaan, Pengembangan dan Sosialisasi Sejarah Seni dan Budaya
14	Temu Sejarah bagi Rang Mudo dan Puti Bungsu di Kota Wisata
15	Filem Edukasi Dokumen Drama

3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (P.9)

a. Tujuan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya adalah untuk Pendataan dan Pelestarian Warisan Budaya yang tersebar di Kab/Kota se Sumatera Barat

b. **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Pendataan Nilai-Nilai Tradisi dan Budaya
2	Pendataan dan Pendokumentasian Warisan Budaya Tak Benda
3	Penyusunan Buku Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi Warisan Budaya Tak Benda
4	Penyusunan Buku Ranji Lembaga Adat
5	Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Musium
6	Transliterasi Naskah Kuno
7	Pengadaan Koleksi Musium
8	Fasilitas Digilitalisasi Sistim Informasi Koleksi Musium
9	Pembinaan Warisan Budaya Dunia
10	Bimtek Sejarah dan Kepurbakalaan
11	Pembuatan Buku Infetarisasi Bersejarah dan Benda-Benda Purbakala
12	Lomba Foto Grafi Cagar Budaya dan Pameran Foto Rekor Muri
13	Lomba Pidato Bela Negara

4) Program Pengembangan dan Penguatan Nilai-Nilai Budaya (P.10)

a. Tujuan Pengembangan, Penguatan Nilai-Nilai Budaya adalah Terinternalisasinya Nilai-Nilai Budaya Nilai-Nilai Budaya bagi Masyarakat Sumatera Barat

b. Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1	Penyelengaraan Olimpiade Tradisi Minangkabau
2	Lomba Penulisan Cerita Rakyat
3	Apresiasi dan Pembinaan Foklor Tradisi Bakaba
4	Apresiasi terhadap Karya Seni
5	Pembinaan dan Gelanggang Tradisi
6	Rapat Koordinasi Pelaku Sejarah dan Budayawan

5) Program Peningkatan Diplomasi Seni Budaya (P.11)

a. Tujuan Peningkatan Diplomasi Budaya adalah Memperkenalkan Budaya Minangkabau di tingkat Nasional dan Internasional

b. **Kegiatan yang direncanakan** adalah sebagai berikut :

1	Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional
2	Pekan Budaya Sumatera Barat
3	Gita Bahana Nusantara
4	Diplomasi Budaya
5	Dialog antar Seniman dan Budayawan
6	Festival Warisan Budaya Tak Benda dalam dan luar Provinsi

5.2. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Urusan Pendidikan

1) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA

Tabel V.1
Indikator Kinerja Makro
Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA

No	Indikator Kinerja	Kodisi Awal 2015	Target Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	% Rata-rata lama sekolah	8,42	8,46	8.50	8,54	8,58	8,62	8,66
2.	% APK SMA/SMK/MA/SMALB dan Paket C Provinsi	96,65	96,88	97.11	97. 34	97,57	97,80	98,03
3.	% APM SMA/SMK/MA/SMALB dan Paket C Provinsi	73,10	73,35	73,60	73. 85	74,10	74,35	74,60
4.	Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	4,13	3,91	3. 60	3,42	3,19	2,94	2,51

2) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK

Tabel V.2
Indikator Kinerja Makro
Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK

No	Indikator Kinerja	Kodisi Awal 2015	Target Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Putus SMA dan SMK	1,2	0,94	0,78	0,76	0,73	0,69	0,65
2.	Angka Kelulusan Sekolah Menengah	96,42	97,11	97,35	98,01	98,14	99,02	99,80
3.	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	27,16	34,91	45,23	46,54	48,19	49,20	50,00
4.	Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	22,14	26,91	32,00	33,50	35,41	37,16	40,00

3) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel V.3
Indikator Kinerja Makro
Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Indikator Kinerja	Kodisi Awal 2015	Target Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tenaga Pendidik yang Lulus UKG	52,63	58,92	65,18	67,17	69,29	70,71	72,18
2.	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	17,21	18,34	19,17	19,65	21,79	23,14	25,17
3.	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	58,28	62,14	65,18	67,79	69,61	71,41	75,15

4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tabel V.4
Indikator Kinerja Makro
Program Manajemen Pelayanan Pendidik

No.	Indikator Kinerja	Kodisi Awal 2015	Target Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sekolah Menengah dan SLB Terakreditasi Minimal B	68,21	70,23	73,67	75,13	77,29	78,92	82,51

5) Program Pendidikan Karakter

Tabel V.5
Indikator Kinerja Makro
Program Pendidikan Karakter

No	Indikator Kinerja	Kodisi Awal 2015		Target Sasaran				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Intregritas Siswa	60	64	68	72	77	79	85
2	Persentase Guru BK Paham Pencegahan Narkoba	5	6	7	8	8	9	10
3	Sekolah Menengah dg Sistem Boading Schooll yang Bernuansa Islami	3	3	7	11	11	11	12
4	Persentase Sekolah Menengah dg Sistem Boading Schooll yg Bernuansa Islami Lulus Tahfis	6,79	6,91	7,25	7,62	7,89	8,11	8,92
5	Sekolah Menengah yang Bernuansa Islami	3	3	5	11	11	11	12
6	Sekolah Menengah yang Bernuansa Islami Lulus Tahfis	5,11	5,71	5,95	6,23	6,41	6.50	6,75
7	Persentase Peningkatan Pemahaman dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Bagi Peserta Didik	7,62	8,24	9,08	10. 02	10,79	11,21	11,74

6) Program *Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus*

Tabel V.6
Indikator Kinerja Makro
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

No	Indikator Kinerja	Kodisi Awal 2015	Target Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Khusus	63,40	67,11	73. 68	75,51	77,26	79,41	80,00

Keterkaitan Rencana Program Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.12

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA - PROGRAM (Outcome) - KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN				
					2016	2017	2018	2019	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(T.1) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	**(S1.1)** APK SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C Prov	86 %	**Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA**	**Meningkatnya Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMAi**					
			Pembangunan SMAN 1 Sumatera Barat (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan 2 kopel rumah dinas guru (baru dan lanjutan) serta terpasangnya teralis besi pada setiap kamar siswa dan tersedianya grill saluran keliling		3 Paket			
	(S1.2) APM SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C Prov	73,35 %	Pembangunan SMAN 2 Sumatera Barat (Lanjutan) Barat	Terlaksananya Pembangunan asrama siswa dan pagar keliling serta penataan taman di SMAN 2 Sumatera Barat		3 Paket			
	(S1.3) Angka Putus Sekolah di SMA/SMK	0,58 %	Pembangunan SMAN 3 Sumatera Barat (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan asrama siswa dan RKB serta Land Clearing di SMAN 3 Sumatera Barat		3 Paket			
	(S1.4) Rata-rata lama sekolah Dikmen	8,66 th	Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 1 Sumatera Barat	Tersedianya biaya operasional SMAN 1 Sumatera Barat		12 bulan			
			Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat	Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Operasional SMA 2 Sumbar		12 bulan			
	(S1.5) Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	1,92 %	Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 3 Sumatera Barat	Telaksananya PBM di SMAN 3 Sumatera Barat		12 bulan			
			Pemeliharaan dan Perawatan WC/ Toilet Asrama SMAN1 Sumatera Barat	Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan WC/ Toilet Asrama di SMAN 1 Sumatera Barat		1 Paket			
			Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia SMA Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Lomba Debat bahasa inggris dan Bahasa Indonesia Tingkat SMA Provinsi dan Nasional		57 Orang			
			Pelaksanaan FLS2N SMA Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya Pemenang FLS2N Tingkat Provinsi		9 Cabang			
			Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya Pemenang O2SN Tingkat Provinsi		12 Cabang			
			Pelaksanaan OSN SMA Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya Pemenang OSN Tingkat Provinsi		765 orang			
			Penyusunan Materi Bencana Alam yang terintegrasi pada Mata Pelajaran di SMA dan SMK	Tersusunnya Materi Bencana Alam yang terintegrasi pada Mata Pelajaran di SMA dan SMK		2 Dok			
			Workshop guru Bahasa Inggris SMA (ECA FE Learning/AVI)	Terselenggaranya Workshop guru Bahasa Inggris SMA (ECA FE Learning/AVI)		19 K/K			
			Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA dan SMK Kelas X Baru	Terselangarannya kegiatan Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA dan SMK Kelas X Baru		224 sklh			
			Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMA	Tersediannya Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMA		1 Paket			
			Pengadaan Alat Laboratorium SMA dan SMK	Tersedianya Alat Laboratorium SMA dan SMK		1 Paket			
			Pemasangan Pavingblock halaman	Terpasangnya Pavingblock halaman		2 Keg			

			dan drainase	dan drainase					
			Alat Peraga Pendidikan SMA dan SMK	Tersediannya Alat Peraga Pendidikan SMA dan SMK		1 Paket			
			Pengadaan Alat Labor Komputer dan Jaringan	Tersediannya Alat Labor Komputer dan Jaringan		1 Paket			
			Pembangunan Fasilitas Gedung SMA dan SMK	Tersediannya Fasilitas Gedung SMA dan SMK		1 Paket			
			Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA dan SMK	Terlaksanannya Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA dan SMK		1 Paket			
			Pengadaan Moubiler SMA dan SMK	Tersedianya Moubiler SMA dan SMK		1 Paket			
			Pra UN SMA Tahun Pelajaran 2016/2017	Terlaksananya Pra UN SMA (46528 siswa)		46.528 Siswa			
			Bimbingan Teknis Guru Mata Pelajaran SMA dengan Nilai UN Rendah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Guru Mapel SMA dengan Nilai UN Rendah pada 5 kab/kota UN terendah		6 Mapel			
			Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT	Terlaksananya kegiatan Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT		50 Orang			
			Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMA	Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMA		865 Guru			
			Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Siswa SMA	Terlaksananya Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Siswa SMA		70 Siswa			
(T.2) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**(S2.1)** Peningkatan Pelayanan PK-LK	94,05 %	**Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**	**Meningkatnya Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**					
			US SDLB dan UAS SLB Tahun Pelajaran 2016 / 2017	Terselengaranya Ujian Sekolah di SLB Tahun Pelajaran 2016/2017		23 Mapel			
	(S2.2) APK SDLB (PK)	100,90%	FLS2N SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terpilihnya pemenang FLS2N SMA Tingkat Provinsi		12 Cbg			
	(S2.3) APK SMPLB (PK)	37,02 %	O2SN SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terpilihnya pemenang O2SN SMA Tingkat Provinsi		12 Cbg			
	(S2.4) APK SMALB (PK)	13,51 %	Lomba Keterampilan dan Lomba Literasi SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Tersedianya literasi dan lomba keterampilan sdlb smplb dan SMA LB		13 Cbg			
			Seleksi, Pembekalan, dan Penghargaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)	TerpilihyaGTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)		12 Jenis			
			Validasi dan Evaluasi KTSP SLB Biaya Pengelolaan SLB Negeri Sumatera Barat	Tervalidasinya dan Evaluasi KTSP SLB		138 Sekolah			
			Biaya Pengelolaan Sekolah Keterbakatan Olahraga	Terlaksananya PBM di SLB Negeri Sumatera Barat		30 Sekolah			
			Pembinaan dan Pengembangan KKKS dan KKG SLB	Terlaksananya PBM di Sekolah Keterbakatan Olahraga		12 Bulan			
			Penataan Kelembagaan SLB Negeri	Terlaksanannya kegiatan KKKS dan KKG SLB secara optimal		18 Kab/ Kota			
			Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SLB	Tertatanya kelembaan SLB Negeri Tersedianya Alat Peraga Pendidikan SLB		30 Sekolah			
			Pengadaan Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Busana, Tata Rias) SLB	Tersedianya Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Busana, Tata		15 Paket			

				Rias) SLB					
			Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SLB	Terlaksanannya Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SLB		15 Paket			
			Peningkatan Kompetensi Guru Keterampilan SLB	Meningkatnya Kompetensi Guru Keterampilan SLB		138 Org			
			Peningkatan Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan)	Meningkatnya Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan)		100 Org			
			Rekruitmen dan Pelatihan Calon Kepala SLB	Terpilihnya Calon Kepala SLB		250 Org			
			Rekruitmen dan Pelatihan Calon Pengawas SLB	Terpilihnya Calon Pengawas SLB		20 Org			
			Pemantapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terselenggarannya Pemantapan Pendidikan Inklusif		20 Org 9 K/K			
(T.3) Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	**(S3.1)** Peringkat UN di tingkat nasional	8	**Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK**	**Meningkatnya Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK**					
			Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMKN1 Sumatera Barat	Terlaksanannya PBM di SMKN1 Sumatera Barat		12 Bln			
	(S3.2) Angka Kelulusan SMA/MA	99,15 %	Lanjutan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Pustaka SMKN1 Sumatera Barat	Terlaksananya Pembangunan 2 unit RKB, 2 unit Laboraturium dan 1 unit Pustaka di SMKN1 Sumatera Barat		3 pkt			
	(S3.3) Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri	52,05 %	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK secara online		7 Kota			
			Praktek Kompetensi Keahlian Siswa SMK	Terlaksananya Diklat Kompetensi Keahlian Siswa SMK		400 orang			
	(S3.4) Angka Kelulusan SMK	99,12 %	Uji Kompetensi Keahlian siswa SMK melalui LSP	Uji Kompetensi Keahlian siswa SMK melalui LSP		400 orang			
			LCC tentang TAP MPR dan UUD 45 Tingkat SMA dan SMK	Terselenggaran kegiatan LCC tentang TAP MPR dan UUD 45 Tingkat SMA dan SMK		228 orang			
	(S3.5) Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri	58 %	Pemeliharaan Gedung Praktek (workshop) dan Asrama BLPT	Terlaksanannya pemeliharaan gedung praktek(workshop) dan asrama BLPT		1 Paket			
			Pembangunan Asrama BLPT Tahap III	Terlaksananya pembangunan asrama tahap III di BLPT Terpilinya pemenang Lomba		1 unit			
	(S3.6) Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	79,74 %	Lomba Debat Bahasa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	Debat Bahasa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		160 orang			
			Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Terpilihnya pemenang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		32 Cabang			
	(S3.7) Indek Integritas Siswa	85	Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di BLPT	Terlaksanannya perbaikan peralatan praktek/Peraga Siswa di BLPT		5 Jurusan			
			Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di BLPT	Terpenuhinya bahan praktek pendidikan bagi siswa di BLPT untuk 5 program keahlian		3 paket			
			Bimtek Guru Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian SMK Teknologi Se Sumatera Barat (In and On	Terlaksananya Bimtek Guru Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian SMK Teknologi Se Sumatera Barat		60 orang			

			Service)	(In and On Service)					
			Pelaksanaan FLS2N SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya pemenang FLS2N SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		10 Cabang			
			Pelaksanaan O2SN SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya pemenang O2SN SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		10 Cabang			
			Pelaksanaan FKSI SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya pemenang FKSI SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		108 Sekolah			
			Penelusuran lulusan SMA dan SMK yang diterima di Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha/ Industri	Terdatanya siswa yang diterima di perguruan tinggi dan DUDI		19 Kab/Kota			
			Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECA FE Learning/A VI)	Terselenggaranya Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECA FE Learning/A VI)		19 Kab/Kota			
			Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK	Terlaksanannya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Keahlian SMK se Sumatera Barat		106 sekolah			
			Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMK	Tersediannya Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMK		1 Paket			
			Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK	Tersedianya Alat Praktek Siswa SMK		6 set			
			Pra UN SMK Tahun Pelajaran 2016/2017	Terlaksananya Pra UN SMK (25077 siswa)		25.077 Siswa			
			Bimbingan Teknis Guru Mata Pelajaran SMK dengan Nilai UN Rendah	Terlaksanya Bimbingan Teknis Guru Mapel SMK dengan Nilai UN Rendah pada 5 kab/kota UN terendah		4 Mapel			
			Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK		608 orang			
			Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Siswa SMK	Terlaksananya Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Siswa SMK		70 Siswa			
(T.4) Meningkatkan Mutu, dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**(S4.1)** Uji Kompetisi Guru SLB	65,29 %	**Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**	**Meningkatnya Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**					
			US SDLB dan UAS SLB Tahun Pelajaran 2016 / 2017	Terselengaranya Ujian Sekolah di SLB Tahun Pelajaran 2016/2017		23 Mapel			
	(S4.2) Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	91 %.	FLS2N SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terpilihnya pemenang FLS2N SLB Tingkat Provinsi		12 Cbg			
			O2SN SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terpilihnya pemenang O2SN SLB Tingkat Provinsi		12 Cbg			
	(S4.3) Akreditasi SLB Minimal B sekurang-kurangnya	52 sklh	Lomba Keterampilan dan Lomba Literasi SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Tersedianya literasi dan lomba keterampilan sdlb smplb dan SMA LB		13 Cbg			
			Seleksi, Pembekalan, dan Penghargaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)	TerpilihyaGTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)		12 Jenis 138 Sekolah			
	(S4.4) Lulusan SLB	95,03 %	Validasi dan Evaluasi KTSP SLB Biaya Pengelolaan SLB Negeri Sumatera Barat	Tervalidasinya dan Evaluasi KTSP SLB		30 Sekolah			
			Biaya Pengelolaan Sekolah Keterbakatan Olahraga	Terlaksananya PBM di Sekolah Keterbakatan Olahraga		12 Bulan			
			Pembinaan dan Pengembangan KKKS dan KKG SLB	Terlaksanannya kegiatan KKKS dan KKG SLB secara optimal		18 Kab/ Kota			

			Penataan Kelembagaan SLB Negeri	Tertatanya kelembaan SLB Negeri		30 Sekolah			
			Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SLB	Tersedianya Alat Peraga Pendidikan SLB		15 Paket			
			Pengadaan Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Busana, Tata Rias) SLB	Tersedianya Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Busana, Tata Rias) SLB		15 Paket			
			Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SLB	Terlaksanannya Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SLB		138 Org			
			Peningkatan Kompetensi Guru Keterampilan SLB	Meningkatnya Kompetensi Guru Keterampilan SLB		100 Org			
			Pemantapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terselenggaranya Pendidikan Inklusi dengan Baik		9 Kab/ Kota			
(T.5) Meningkatkan tata kelola dan akuntanbilitas manajemen pendidikan	**(S5.1)** Kompetensi tenaga kependidikan (Kepsek,, Pengawas, Laboran, Pustakawan dan Pegawai Tata Usaha)	38,56 %	**Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Meningkatnya Tatakelola Pelayanan Pendidikan**					
			Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan SNP pada sekolah yang terakreditasi C dan TT	Terlaksanannya Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan SNP pada sekolah yang terakreditasi C dan TT		168 sekolah			
			Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA	Terlaksananya Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA		217 sekolah			
	(S5.2) Terakreditasinya Sekolah Menengah/SLB minimal B	90 %	Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMK	Terlaksananya Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMK		108 sekolah			
			Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi	Terpilihnya Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi		1 Keg			
			Penataan Kelembagaan SMK se Sumatera Barat	Tertatanya Kelembagaan SMK se Sumatera Barat		217 sekolah			
			Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan		108 orang			
			Pengelolaan Asrama BLPT	Terlaksanannya pengelolaan asrama BLPT dengan baik		12 Bulan			
			Gebyar Pendidikan 2017 dan Sumbar Expo	Terselenggaranya Gebyar Pendidikan 2017 dan Sumbar Expo		19 k/k			
			Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko Ijazah SMA /SMK dan Pengandaan Blanko Ijazah SLB	Terselenggaranya Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko Ijazah SMA / SMK dan Pengandaan Blanko Ijazah SLB		663 sekolah			
			Pengelolaan Dana BOS	Terkelolanya Pengelolaan Dana BOS		81000 sek			
			Pengadaan Rapor Siswa SMA , SMK dan SLB	Tersedianya Rapor Siswa SMA , SMK dan SLB		1 Dok			
			Penyusunan Database Pendidikan Penyebaran Informasi Pendidikan melalui WEB	Tersedianya Database Pendidikan Tersediannya informasi Pendidikan melalui WEB		1 Keg			
			Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pegawas		3500 guru			
			Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD		1 Dok			
			Bimbingan Teknis dan Pembinaan Sekolah Sehat SMA dan SMK	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembinaan Sekolah Sehat SMA dan SMK		19 K/K			

(T.6) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah	**(S6.1)** Nilai uji kompetensi guru	86,18	**Program Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan**	**Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**					
	(S6.2) Persentase guru BK paham terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 %	Peningkatan Kompetensi Guru yang akan mengikuti UKG (Penekanan pada TIK)	Terlaksananya Kompetensi Guru yang akan mengikuti UKG		135 orang			
			Rekrutmen dan Pembekalan Guru Inti SMA dan SMK Tingkat Prov. Sumbar	Terlaksananya Rekrutmen dan Pembekalan Guru Inti SMA dan SMK		320 orang			
			Pemberdayaan Forum MGMP SMA Provinsi dan Kab/Kota	Terselengaranya Forum MGMP SMA Provinsi dan Kab/Kota		19 Kab/Kota			
			Pemberdayaan Forum MGMP SMK Provinsi dan Kab/Kota	Terselengaranya Forum MGMP SMK Provinsi dan Kab/Kota		19 Kab/Kota			
			Bimtek PTK bagi Guru SMA	Terlaksanannya Bimtek PTK bagi SMA		50 orang			
			Bimtek PTK bagi Guru SMK	Terlaksanannya Bimtek PTK bagi SMK		50 orang			
			Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMA Tingkat Provinsi dan Nasional	Terseleksinnya GTK Berprestasi SMA Tingkat Provinsi dan Nasional		114 orang			
			Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	Terseleksinnya GTK Berprestasi SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		114 orang			
			Sertifikasi Assesor Kompetensi LSP Bagi Guru SMK	Terlaksanannya Sertifikasi Assesor Kompetensi LSP Bagi Guru SMK se Sumatera Barat		60 orang			
			Pemberian Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK berprestasi Tingkat Provinsi	Terlaksanannya Pemberian Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK berprestasi Tingkat Provinsi		12 Cabang			
			Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Terlaksananya Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		19 Kab/Kota			
			Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Terlaksananya Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		19 Kab/Kota			
			Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Kepala SMA		50 orang			
			Peningkatan Kompetensi Kepala SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Peningkatan Kompetensi Kepala SMK		50 orang			
			Peningkatan Kompetensi Pengawas SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Pengawas SMA Tingkat Provinsi		50 orang			
			Peningkatan Kompetensi Pengawas SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Pengawas SMK Tingkat Provinsi		50 orang			
			Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Laboran SMA Tingkat Provinsi		50 orang			
			Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Laboran SMK Tingkat Provinsi		50 orang			
			Pemetaan Kebutuhan Kepala SMA dan SMK	Terpenuhinya data Kebutuhan Kepala SMA dan SMK		324 orang			
			Penguatan Kelembagaan dan Pelaksanaan Tupoksi Pengawas SMA dan SMK	Tersediannya data Kelembagaan dan Pelaksanaan Tupoksi Pengawas SMA dan SMK		57 orang			
			Alih Fungsi guru Adaptif SMK menjadi Guru Produktif	Terlaksananya kegiatan Alih Fungsi guru Adaptif SMK menjadi Guru		19 Kab/Kota			

				Produktif					
			Peningkatan Kompetensi Petugas Tata Usaha SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Tata Usaha SMA Tingkat Provinsi		150 orang			
			Peningkatan Kompetensi Petugas Tata Usaha SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Tata Usaha SMK Tingkat Provinsi		100 orang			
			Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMA Tingkat Provinsi		55 orang			
			Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMK Tingkat Provinsi		50 orang			
(T.7) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah luar biasa dan pendidikan layanan khusus	**(S7.1)** Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 72,25	72,25	**Program Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan**	**Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK-LK**					
	(S7.2) Kepala Sekolah memiliki NUKS 90 %	90 %	Peningkatan Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan)	Meningkatnya Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan)		250 Org			
	(S7.3) Uji Kompetensi Pengawas SLB 74,02	74,02	Rekruitmen dan Pelatihan Calon Kepala SLB	Terpilihnya Calon Kepala SLB		20 Org			
			Rekruitmen dan Pelatihan Calon Pengawas SLB	Terpilihnya dan Terlaksananya Pelatihan Calon Pengawas SLB		20 Org			
(T.8) Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	**(S8.1)** Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat		**Pendidikan Karakter**	**Meningkatnya Penumbuhan Pendidikan Karakter**					
			Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMA	Terlaksananya Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMA		317 orang			
	(S8.2) Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti		Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMK	Terlaksananya Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMK		207 orang			
			Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMA dalam pencegahan Narkoba	Terlaksananya Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMA dalam pencegahan Narkoba		60 orang			
	(S8.3) Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan		Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMK dalam pencegahan Narkoba	Terlaksanannya Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMK dalam pencegahan Narkoba		60 orang			
			Kegiatan tahfis Al-Quran pada 10 sekolah Boarding School	Terselenggarannya Kegiatan tahfis Al-Quran pada 10 sekolah Boarding School		10 Sekolah			
	(S8.4) Indek Itregritas Siswa		Kegiatan tahfis Al-Qur'an pada 8 sekolah Fullday	Terselenggarannya tahfis Al-Qur'an pada 8 sekolah Fullday		8 Sekolah			
	(S8.5) Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya		Penyusunan Buku Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Al-Qur'an dan BAM ke dalam Pembelajaran SMA dan SMK	Terlaksananya Penyusunan Buku Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Al-Qur'an dan BAM ke dalam Pembelajaran SMA dan SMK		13 MP SMA dan SMK			
	(S8.6) Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang		Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA dan SMK	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA dan SMK		2 Dok			

	Bernuasa Islami **(S8.7)** Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau		Bimtek Pelaksanaan Muatan Lokal bagi Guru SMA dan SMK Piloting Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Nasional yang Berintegritas SMA dan SMK	Terselenggarannya Bimtek Pelaksanaan Muatan Lokal bagi Guru SMA dan SMK Piloting Tersedianya media pembelajaran penunjang pedidikan berkarakter SMA dan SMK		38 orang 524 sek			
(T.9) Meningkatkan apresiasi budaya alam minangkabau.	**(S9.1)** Penguatan peran lembaga adat, lembaga seni, institusi sekolah dan orang tua dalam ekosistem kebudayaan		**Program Peningkatan dan Penguatan Ekosistem Lembaga-Lembaga Adat dan Seni Budaya** Pembinaan dan Pemberdayaan Pemangku Adat Temu Konsultasi Ketua KAN dan Bundo Kanduang Koordinasi dan Asistensi Lembaga Adat Advokasi bagi Lembaga Adat Peningkatan Kapasitas LKAAM dan Bundo Kanduang Pengembangan Sanggar-Sanggar Seni Melalui Taman Budaya Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni dan Budaya Peningkatan Kompetensi Pemangku Adat Peningkatan Apresiasi melalui Pameran dan Pegelaran Karya Seni Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui Lomba/Festival tingkat Daerah dan Nasional Pendataan Group Kesenian Bimtek Pengelolaan Manajemen Sanggar Festival Seni Tari Lomba Paduan Suara Antar Komunitas Lomba Shalawat Dulang Festival Teater Festival Randai Festival Lomba Berbalas Pantun Lomba Baca Puisi Monev Pembinaan Kesejarahan dan Benda-Benda Keperbukalaan Daerah dan Nasional	**Program Peningkatan dan Penguatan Ekosistem Lembaga-Lembaga Adat dan Seni Budaya** Pembinaan dan Pemberdayaan Pemangku Adat Temu Konsultasi Ketua KAN dan Bundo Kanduang Koordinasi dan Asistensi Lembaga Adat Advokasi bagi Lembaga Adat Peningkatan Kapasitas LKAAM dan Bundo Kanduang Pengembangan Sanggar-Sanggar Seni Melalui Taman Budaya Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni dan Budaya Peningkatan Kompetensi Pemangku Adat Peningkatan Apresiasi melalui Pameran dan Pegelaran Karya Seni Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui Lomba/Festival tingkat Daerah dan Nasional Pendataan Group Kesenian Bimtek Pengelolaan Manajemen Sanggar Festival Seni Tari Lomba Paduan Suara Antar Komunitas Lomba Shalawat Dulang Festival Teater Festival Randai Festival Lomba Berbalas Pantun Lomba Baca Puisi Monev Pembinaan Kesejarahan dan Benda-Benda Keperbukalaan Daerah dan Nasional					

	(S9.2) Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan budaya		**Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya**					
			Peningkatan Kompetensi Rang Mudo dalam Pasambahan Adat Minang	Peningkatan Kompetensi Rang Mudo dalam Pasambahan Adat Minang					
			Penyusunan Buku Kearifan Lokal	Penyusunan Buku Kearifan Lokal					
			Aktivitas Sekolah Binaan Bundo Kanduang	Aktivitas Sekolah Binaan Bundo Kanduang					
			Peningkatan Kompetensi Puti Bungsu	Peningkatan Kompetensi Puti Bungsu					
			Lomba Berpakaian Baju Kuruang Basiba dan Taluak Balango	Lomba Berpakaian Baju Kuruang Basiba dan Taluak Balango					
			Peningkatan Kompetensi Kader Panghulu	Peningkatan Kompetensi Kader Panghulu					
			Pemilihan dan Pembinaan Duta Budaya Minangkabau	Pemilihan dan Pembinaan Duta Budaya Minangkabau					
			Bimtek Manajemen Seni Pertunjukan Pameran Koleksi Musium Daerah Regional, Nasional dan Internasional	Bimtek Manajemen Seni Pertunjukan Pameran Koleksi Musium Daerah Regional, Nasional dan Internasional					
			Penyusunan Penyebaran Informasi Koleksi Musium	Penyusunan Penyebaran Informasi Koleksi Musium					
			Peningkatan Fasilitas Musium	Peningkatan Fasilitas Musium					
			Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya bagi Generasi Muda	Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya bagi Generasi Muda					
			Pembinaan, Pengembangan dan Sosialisasi Sejarah Seni dan Budaya	Pembinaan, Pengembangan dan Sosialisasi Sejarah Seni dan Budaya					
			Temu Sejarah bagi Rang Mudo dan Puti Bungsu di Kota Wisata	Temu Sejarah bagi Rang Mudo dan Puti Bungsu di Kota Wisata					
			Filem Edukasi Dokumen Drama	Filem Edukasi Dokumen Drama					
	(S9.3) Mengimventaris dan Memelihara Kekayaan Budaya		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Meningkatnya Jumlah Kekayaan Budaya yang Terpilih Dengan Baik**					
			Pendataan Nilai-Nilai Tradisi dan Budaya	Pendataan Nilai-Nilai Tradisi dan Budaya					
			Pendataan dan Pendokumentasian Warisan Budaya Tak Benda	Pendataan dan Pendokumentasian Warisan Budaya Tak Benda					
			Penyusunan Buku Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi Warisan Budaya Tak Benda	Penyusunan Buku Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi Warisan Budaya Tak Benda					
			Penyusunan Buku Ranji Lembaga Adat	Penyusunan Buku Ranji Lembaga Adat					
			Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Musium	Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Musium					
			Transliterasi Naskah Kuno	Transliterasi Naskah Kuno					
			Pengadaan Koleksi Musium	Pengadaan Koleksi Musium					
			Fasilitas Digilitalisasi Sistim Informasi Koleksi Musium	Fasilitas Digilitalisasi Sistim Informasi Koleksi Musium					
			Pembinaan Warisan Budaya Dunia	Pembinaan Warisan Budaya Dunia					
			Bimtek Sejarah dan Kepurbakalaan	Bimtek Sejarah dan Kepurbakalaan					

			Pembuatan Buku Infetarisasi Bersejarah dan Benda-Benda Purbakala	Pembuatan Buku Infetarisasi Bersejarah dan Benda-Benda Purbakala					
			Lomba Foto Grafi Cagar Budaya dan Pameran Foto Rekor Muri	Lomba Foto Grafi Cagar Budaya dan Pameran Foto Rekor Muri					
			Lomba Pidato Bela Negara	Lomba Pidato Bela Negara					
	(S9.4) Pemakaian bahasa minang pada bahasa pengantar muatan lokal budaya minangkabau dan pada hari tertentu		**Program Pengembangan dan Penguatan Nilai-Nilai Budaya**	**Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Budaya**					
			Penyelengaraan Olimpiade Tradisi Minangkabau	Terselenggaranya Olimpiade Tradisi Minangkabau					
			Lomba Penulisan Cerita Rakyat	Terlaksananya Lomba Penulisan Cerita Rakyat					
			Apresiasi dan Pembinaan Foklor Tradisi Bakaba	Terlaksananya Apresiasi dan Pembinaan Foklor Tradisi Bakaba					
			Apresiasi terhadap Karya Seni	Terlaksananya Apresiasi terhadap Karya Seni					
			Pembinaan dan Gelanggang Tradisi	Terlaksananya Pembinaan dan Gelanggang Tradisi					
			Rapat Koordinasi Pelaku Sejarah dan Budayawan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaku Sejarah dan Budayawan					
	(S9.5) Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian budaya dan diplomasi budaya		**Program Peningkatan Diplomasi Budaya**	**Meningkatnya Peran Budaya Sebagai Media Diplomasi antar Bangsa dan Negara**					
			Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional	Terlaksananya Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional					
			Pekan Budaya Sumatera Barat	Terlaksananya Pekan Budaya Sumatera Barat					
			Gita Bahana Nusantara	Terlaksananya Gita Bahana Nusantara					
			Diplomasi Budaya	Terlaksananya Diplomasi Budaya					
			Dialog antar Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Dialog antar Seniman dan Budayawan					
			Festival Warisan Budaya Tak Benda dalam dan luar Provinsi	Trlaksananya Festival Warisan Budaya Tak Benda dalam dan luar Provinsi					

5.3. PENDANAAN INDIKATIF

a. APBD

Tabel V.13

Pendanaan Indikatif APBD 2016-2021

No	Program	Kodisi Awal 2016	Target (Dalam Jutaan Rupiah)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu SMA	26.659	24.429	25.815	27.563	29.448	31.482
2.	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu SMK	21.812	19.988	21.122	22.551	24.093	25.758

3.	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	755	811	880	956	1.038
4.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.063	8.455	9.074	9.850	10.695	11.616
5.	Pendidikan Berkarakter	1.620	273	293	318	345	375
6.	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	3.108	5.062	5.422	5.886	6.391	6.941
7.	Pemberdayaan dan Penguatan Ekosistim Lembaga-lembaga Adat dan Seni Budaya	1.057	283	303	329	368	388
8.	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	2.747	735	789	856	930	1.010
9.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.024	541	581	631	685	744
10.	Pengembangan dan Penguatan Nilai-nilai Budaya	300	80	86	93	102	110
11.	Peningkatan Diplomasi Seni Budaya	350	94	100	109	118	129

b. APBN

Tabel V.14
Pendanaan Indikatif APBN

No	Program	Kodisi Awal 2016	Target Dalam Jutaan Rupiah				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu SMA	3.120	3.744	4.493	5.391	6.470	7.764
2.	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu SMK	3.226	3.871	4.645	5.575	6.689	8.027
3.	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.069	1.283	1.539	1.847	2.217	2.665
4.	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1.225	1.470	1.764	2.117	2.540	3.048

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SUMATERA BARAT 2016-2021

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2015, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel VI.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.42	8.46	8.50	8.54	8.58	8.62	8.66
2.1.2	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**								
	- SD/MI/SDLB/Paket A	%	116.48	-	-	-	-	-	-
	- SMP/MTSn/SMPLB/Paket B	%	105.01	-	-	-	-	-	-
	- SMA /SMK/MA/SMALB/Paket C	%	96.64	96.88	97.11	97.34	97.57	97.8	98.03
	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	- SD/MI/SDLB/Paket A	%	99.57	-	-	-	-	-	-
	- SMP/MTSn/SMPLB/Paket B	%	81.15	-	-	-	-	-	-
	- SMA /SMK/MA/SMALB/Paket C	%	73.08	74.35	73.60	73.85	74.10	74.35	74.6
	Rank Nasional Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S.1/D.4								
	- SMA	%	91.01	92.14	94.79	96.11	97.86	98.99	100
	- SMK	%	87.13	89.16	92.29	94.17	96.87	97.41	100
	Rank Nasional Sertifikasi Guru (Pemerintah Pusat)								
	- SMA /SMK/MA	Org	-	-	-	-	-	-	-
	Rank Nasional Belajar 12 Tahun	%	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Jumlah Lembaga Terakreditasi	%	34	53	68	85	91	96	100
	Relevansi Pendidikan, Rasio Guru Bidang Study dan Siswa	%	35	30	30	25	25	20	20
	Sekolah Boarding Schooll Bertaraf Maju	Sklh	3	11	11	11	11	12	12

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 merupakan program kerja dalam pembangunan bidang pendidikan, sekaligus merupakan bagian dari rencana pembangunan SDM Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan pendidikan baik tingkat provinsi, Kab/Kota, dan tingkat satuan pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera barat Tahun 2016-2021 adalah merupakan program kerja yang tersistem dan terarah untuk mewujudkan" manusia Indonesia seutuhnya" yang mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara utuh dan optimal yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu (1) keluhuran moral, ahlak mulia, keimanan dan ketakwaan, (2) kemampuan mengantisipasi dan menyiapkan kehidupan masa depan, (3) kecanggihan kompetensi iptek, (4)) kematangan kepribadiannya serta (5) keindahan ekspresi estetis.

Kebijakan dan program Rencana Strategis ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan ini masih bersifat indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional ke dalam perencanaan tahunan dan rencana kerja dan penganggaran pada tingkat departemen, unit organisasi dan satuan kerja. Sebagai program kerja dan acuan dalam pelaksanaan tahunan program pembangunan, dituangkan perkiraan target-terget pencapaian tahunan. Sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan serta masyarakat pada umumnya.

Dalam operasionalisasinya pembangunan pendidikan terkait dengan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan nasional bidang pendidikan, dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan serta memperhatikan karakteristik, potensi, dan keuggulan setempat.

Seluruh unsur penyelenggara pendidikan, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan baik dalam hubungannya dengan kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, diharuskan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas serta keterpaduan dan sinkronisasi yang sinergi, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang melekat pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sehingga potensi dan keunggulan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemajuan pendidikan.

Selain itu, masyarakat dan satuan pendidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di lingkungannya, dengan tetap perpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program, antara lain dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai forum/musyawarah atau koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Padang,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat,

Drs. Burhasman, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19590424 198403 1 006